

## **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 963/704/V/BPKAD/2021  
Tanggal, 24 November 2021**

**dan**

**NOMOR : 170 /358/ DPRD / 2021  
Tanggal, 24 November 2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**  
Jabatan : Bupati Barito Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

2. a. Nama : **Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan  
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.
- b. Nama : **Hj. ENUNG IRAWATI**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan  
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Barito Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antar DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

Anggaran 2022, kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Buntok, 24 November 2021.

**BUPATI BARITO SELATAN**

Selaku,  
PIHAK PERTAMA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN**

Selaku,  
PIHAK KEDUA

**EDDY RAYA SAMSURI**

**Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M**  
Ketua

**Hj. ENUNG IRAWATI**  
Wakil Ketua

**LAMPIRAN**

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 963/704/V/BPKAD/2021**

**Tanggal, 24 November 2021**

**dan**

**NOMOR : 170/358/ DPRD / 2021**

**Tanggal, 24 November 2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>II - 1</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 27
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD</b>	<b>III - 1</b>
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN	III - 1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III - 3
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>IV - 1</b>
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021	IV - 1
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV - 1
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	<b>V - 1</b>
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	V - 1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	V - 3
5.3 Pagu Perangkat Daerah	V - 8
5.4 Pagu Belanja menurut Urusan Pemerintahan	V - 10
5.5 Surplus/Defisit	V - 17
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>VI - 1</b>
6.1 Penerimaan Pembiayaan	VI - 1
6.2 Pengeluaran Pembiayaan	VI - 1
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>	<b>VII - 1</b>
7.1 Strategi Pencapaian Target Penerimaan Daerah	VII - 1
7.2 Strategi Penyerapan Anggaran	VII - 3
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>VIII - 1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman pada RKPD serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Barito Selatan

Tahun Anggaran 2022 serta sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2022 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Tahun 2022.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Kebijakan Umum ini merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan pencapaian target RPJMD tahunan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan rencana kegiatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor     );
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 13).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Bab ini membahas arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kinerja perekonomian daerah Kabupaten Barito Selatan beserta dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Selain itu akan dibahas terkait arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun sebelumnya**

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan baik migas maupun non migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi, PDRB per kapita, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks gini (*gini ratio*).

###### **2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Untuk mengetahui dinamika ekonomi di suatu wilayah, dapat diketahui melalui data produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi) sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi.

Pada tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Selatan mencapai angka 6.276,70 miliar yang mana terjadi perlambatan pertumbuhan sebesar -1,37 persen. Hal ini disebabkan sepanjang tahun 2020 terjadi fenomena penyebaran virus covid-19 yang pengaruhnya berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya perekonomian. PDRB

atas dasar harga berlaku dari tahun 2015-2020 secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**(miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2015-2020**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	916,10	957,60	1018,50	1084,70	1173,30	1213,90
2	Pertambangan dan Penggalian	840,30	905,90	1046,00	1154,60	1160,00	843,00
3	Industri Pengolahan	291,00	319,40	338,50	348,00	365,70	373,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,90	2,20	2,60	3,00	3,50	3,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,00	6,80	7,40	8,40	10,00	10,50
6	Konstruksi	282,90	320,30	354,30	392,10	435,80	400,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	337,00	383,10	429,80	469,40	512,70	535,00
8	Transportasi dan Pergudangan	484,30	553,30	621,40	717,90	749,00	768,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87,10	103,10	114,60	124,70	137,00	136,00
10	Informasi dan Komunikasi	54,70	60,80	69,00	74,00	82,40	99,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	204,60	228,20	259,30	279,10	300,70	339,20
12	Real Estat	101,30	112,80	124,80	139,80	155,80	164,80
13	Jasa Perusahaan	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300,90	334,50	368,10	408,60	455,60	501,30
15	Jasa Pendidikan	320,60	363,70	394,80	450,10	497,50	527,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,00	130,70	144,40	162,10	184,20	228,10
17	Jasa Lainnya	95,60	106,00	115,50	126,10	138,40	130,90
PDRB Kabupaten Barito Selatan		443,10	4889,30	5410,70	5943,70	6362,80	6276,70

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka dari Beberapa Edisi

\*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara

Sementara itu, untuk PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) pada tahun 2020 mencapai angka 4.240,20 miliar yang mana angka ini sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 4.365,70 miliar. Secara rinci, PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan tahun 2015-2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2020**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	665,40	679,70	706,50	736,80	774,00	792,90
2	Pertambangan dan Penggalian	896,50	931,30	976,50	1015,30	1071,80	905,10
3	Industri Pengolahan	211,90	223,80	231,30	231,70	239,90	238,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,60	1,80	1,90	2,10	2,20	2,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,50	4,80	4,90	5,20	5,80	6,10
6	Konstruksi	213,90	232,50	245,40	259,30	279,70	248,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	265,40	287,00	304,60	321,50	338,50	343,20
8	Transportasi dan Pergudangan	375,10	414,00	445,20	483,70	477,90	460,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61,30	68,60	74,60	77,90	82,30	80,90
10	Informasi dan Komunikasi	48,40	52,50	57,60	60,50	65,50	77,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	147,90	157,70	171,50	177,70	185,40	199,20
12	Real Estat	73,40	77,30	80,40	84,80	89,30	90,50
13	Jasa Perusahaan	0,60	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,20	224,10	237,30	252,40	269,80	281,50
15	Jasa Pendidikan	218,90	232,80	245,70	267,10	285,00	295,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89,30	95,00	100,70	106,60	116,20	141,00
17	Jasa Lainnya	67,00	70,60	73,60	77,60	81,70	75,70
PDRB Kabupaten Barito Selatan		3554,30	3754,10	3958,30	4160,90	4365,70	4240,20

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Tahun dari Beberapa Edisi

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

### **2.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk menuju keadaan yang lebih baik. Laju pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan persentase pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan dua basis yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan riil dari masing-masing sektor.

Terkait pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan atau pertumbuhan riil di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2015-2019 secara umum bergerak tumbuh ke arah yang lebih baik kecuali untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,20 persen. Pada tahun 2019, tiga teratas kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi dan berkontribusi besar dalam angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan antara lain kategori lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang tumbuh sebesar 12,52 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh pada angka 9,02 persen dan sektor informasi yang berada pada angka 8,26 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018.

Pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan mengalami perlambatan hingga ke angka -2,87 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Adapun sektor ekonomi yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan ke arah negatif pada tahun 2020 terdiri dari sektor pertambangan dan penggalan yang berada pada angka -15,55 persen, sektor industri pengolahan sebesar -0,42 persen, sektor konstruksi sebesar -11,01 persen, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -1,70 persen dan sektor jasa lainnya sebesar -7,34 persen. Adapun sektor yang bertumbuh positif antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,44 persen, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 9,09 persen, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,17 persen, sektor perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,39 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,44 persen, sektor real estat sebesar 1,34 persen, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 4,34 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 3,75 persen dan yang terbesar adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 21,34 persen. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2015-2020 untuk setiap lapangan usaha bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.3**

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,18%	2,15%	3,94%	4,29%	5,06%	2,44
2	Pertambangan dan Penggalian	0,61%	3,88%	4,86%	3,97%	5,57%	- 15,55
3	Industri Pengolahan	5,48%	5,61%	3,35%	0,20%	3,55%	-0,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20,24%	13,02%	7,11%	8,48%	6,55%	9,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83%	6,47%	0,88%	6,28%	12,52%	5,17
6	Konstruksi	7,85%	8,72%	5,52%	5,69%	7,86%	- 11,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16%	8,14%	6,13%	5,53%	5,29%	1,39
8	Transportasi dan Pergudangan	9,78%	10,37%	7,53%	8,67%	-1,20%	-3,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,47%	11,94%	8,78%	4,41%	5,71%	-1,70
10	Informasi dan Komunikasi	7,46%	8,44%	9,63%	5,13%	8,26%	17,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,56%	6,65%	8,78%	3,59%	4,31%	7,44
12	Real Estat	7,40%	5,37%	4,01%	5,43%	5,31%	1,34
13	Jasa Perusahaan	6,02%	6,87%	5,24%	5,45%	6,69%	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,88%	5,10%	5,92%	6,37%	6,88%	4,34
15	Jasa Pendidikan	9,57%	6,36%	5,54%	8,73%	6,71%	3,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,90%	6,38%	5,99%	5,86%	9,02%	21,34
17	Jasa Lainnya	7,50%	5,30%	4,32%	5,12%	4,93%	-7,34



No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*	2020
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	5,54%	5,63%	5,44%	5,12%	4,93%	-2,87

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020, diolah

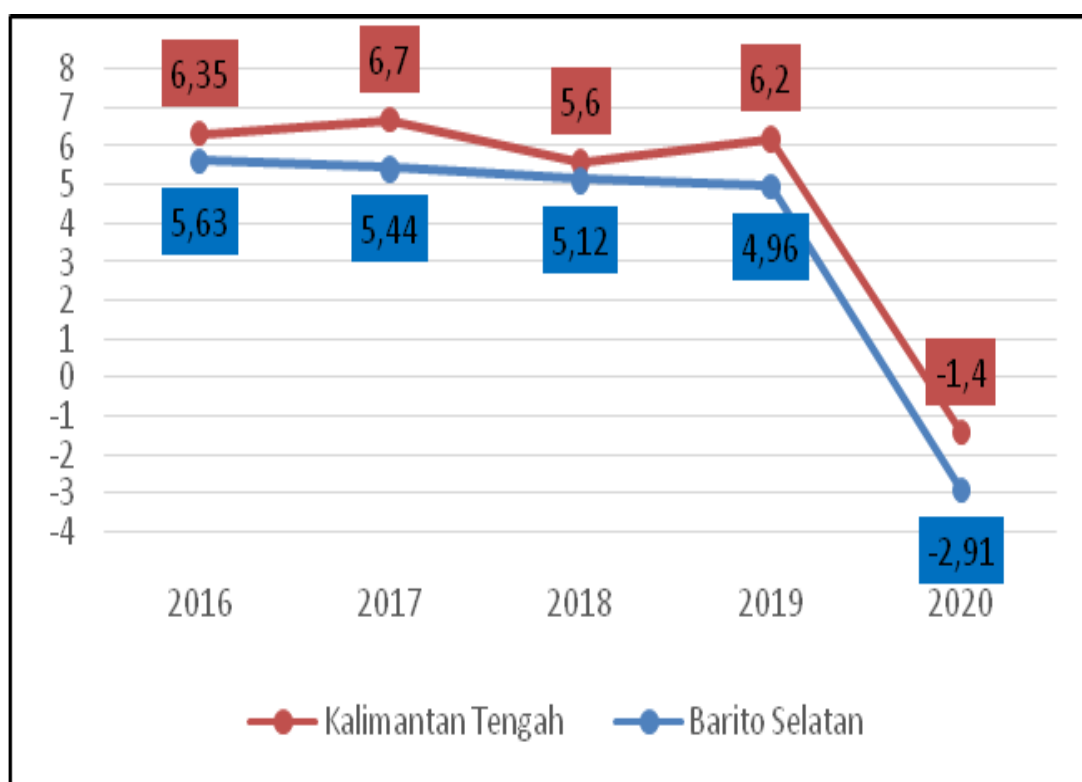
\*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dari tahun 2016-2019 bergerak ke arah positif meskipun angka pertumbuhan tidak bertumbuh secara linier. Pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi ke arah negatif sebesar -2,91 persen. Menurunnya angka pertumbuhan ekonomi ke arah negatif seperti pada uraian di atas, turut disebabkan oleh fenomena penyebaran virus covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut juga cenderung berada di bawah pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi di sektor perekonomian dengan harapan mampu mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan terhadap Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada gambar berikut ini.

### **Gambar 2.1**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) 2016-2020



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka dari Beberapa Edisi, diolah

### 2.1.1.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Struktur ekonomi wilayah dapat digambarkan melalui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku karena menggunakan nilai PDRB pada tahun tertentu yang dipengaruhi oleh dinamika inflasi menurut sub sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Struktur ekonomi juga dapat mengetahui peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah. Analisis ini juga sebagai identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, analisis proses dan tahap transformasi struktural, serta menunjukkan tingkat industrialisasi suatu wilayah. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4**  
Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,59%	18,83%	18,25%	18,44%	19,34%
2	Pertambangan dan Penggalian	18,53%	19,33%	19,43%	18,23%	13,43%
3	Industri Pengolahan	6,53%	6,26%	5,85%	5,75%	5,94%

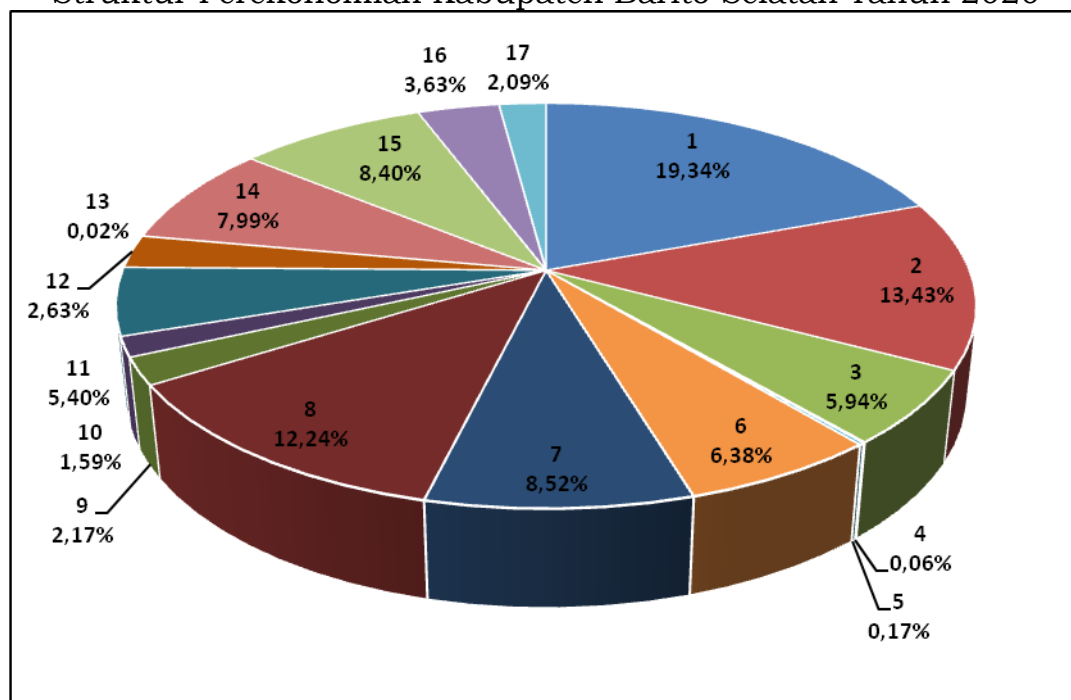
No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14%	0,14%	0,14%	0,16%	0,17%
6	Konstruksi	6,55%	6,55%	6,60%	6,85%	6,38%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84%	7,94%	7,90%	8,06%	8,52%
8	Transportasi dan Pergudangan	11,32%	11,49%	12,08%	11,77%	12,24%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,11%	2,12%	2,10%	2,15%	2,17%
10	Informasi dan Komunikasi	1,24%	1,28%	1,25%	1,30%	1,59%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,67%	4,79%	4,70%	4,73%	5,40%
12	Real Estat	2,31%	2,31%	2,35%	2,45%	2,63%
13	Jasa Perusahaan	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,84%	6,80%	6,87%	7,16%	7,99%
15	Jasa Pendidikan	7,44%	7,30%	7,57%	7,82%	8,40%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,67%	2,67%	2,73%	2,90%	3,63%
17	Jasa Lainnya	2,17%	2,14%	2,12%	2,17%	2,09%
PDRB Kabupaten Barito Selatan		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Dari Beberapa Edisi, diolah

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi kabupaten Barito Selatan dalam periode 2015-2020 cenderung mengalami fluktuasi penurunan kontribusi dalam pembentukan PDRB secara agregat di Kabupaten Barito Selatan dimana pada tahun 2015 tercatat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 20,62 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan ke angka 18,25 persen dan kembali naik di tahun 2019 ke angka 18,44 persen dan kemudian mengalami peningkatan kontribusi sebesar 19,34 persen pada tahun 2020. Demikian pula dengan sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi tumpuan kedua Kabupaten Barito Selatan dalam struktur perekonomian regionalnya yang cenderung fluktuatif di mana pada tahun 2015 proporsi sektor ini berada pada angka 18,91 persen dan pada tahun 2018 mencapai angka 19,43 persen dan kemudian mengalami penurunan kontribusi ke angka 18,23 persen di tahun 2019 dan kembali turun

pada tahun 2020 ke angka 13,43 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 bisa dilihat pada diagram berikut ini.

**Gambar 2.2**  
Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020



**KETERANGAN**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          |
| 2. Pertambangan dan Penggalian                                   | 11. Informasi dan Komunikasi                                      |
| 3. Industri Pengolahan   | 12. Jasa Keuangan dan Asuransi                                    |
| 4. Pengadaan Listrik dan gas                                     | 13. Real Estat  |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 14. Jasa Perusahaan   |
| 6. Konstruksi  | 15. Adminstrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16. Jasa Pendidikan   |
| 8. Transportasi dan Pergudangan                                  | 17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 18. Jasa Lainnya  |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 didominasi oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori

lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang persentasenya secara berturut-turut adalah sebesar 19,34 persen dan 13,43 persen. Kedua kategori lapangan usaha ini termasuk ke dalam sektor primer yang outputnya merupakan bahan mentah dan memiliki nilai tambah relatif rendah. Adapun untuk sektor tersier (sektor yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa), kategori lapangan usaha yang berkontribusi relatif besar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang berkontribusi sebesar 12,24 persen. Selanjutnya terkait dengan kategori lapangan usaha industri pengolahan, berkontribusi sebesar 5,94 persen dalam agregasi PDRB Kabupaten Barito Selatan sehingga apabila mengacu kepada UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization) dalam Muta'ali (2015), Kabupaten Barito Selatan masih belum memasuki proses industrialisasi karena kontribusi di sektor industri pengolahan belum mencapai 10 persen.

Selanjutnya, terkait dengan struktur perekonomian regional Kalimantan Tengah. Struktur perekonomian regional memiliki manfaat untuk melihat peran perekonomian antar sub-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini merupakan kabupaten-kabupaten yang secara administratif tergabung di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan kata lain, struktur perekonomian regional digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian membandingkan kontribusi tersebut terhadap kabupaten lainnya. Berikut kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 2.5**

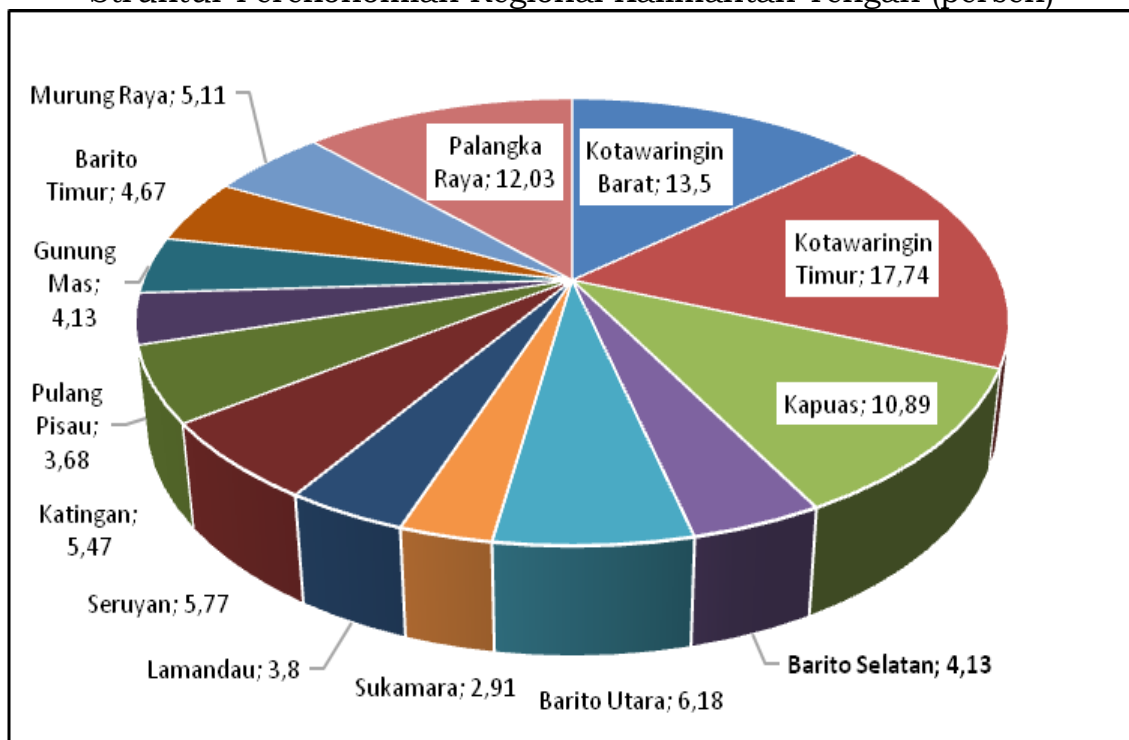
Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten	Capaian Kontribusi PDRB Regional Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Barito Selatan	4,38	4,32	4,29	4,23	4,13

Berdasarkan tabel 2.5, bisa dikatakan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB regional Provinsi Kalimantan Tengah relatif kecil. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Barito Selatan berkontribusi secara konsisten di kisaran angka 4 persen dalam agregasi perekonomian regional provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Adapun untuk tahun 2020, Kabupaten Barito Selatan berkontribusi sebesar 4,13 persen terhadap struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, berikut diagram yang menunjukkan struktur perekonomian regional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.

**Gambar 2.3**

Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah (persen)



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021, diolah

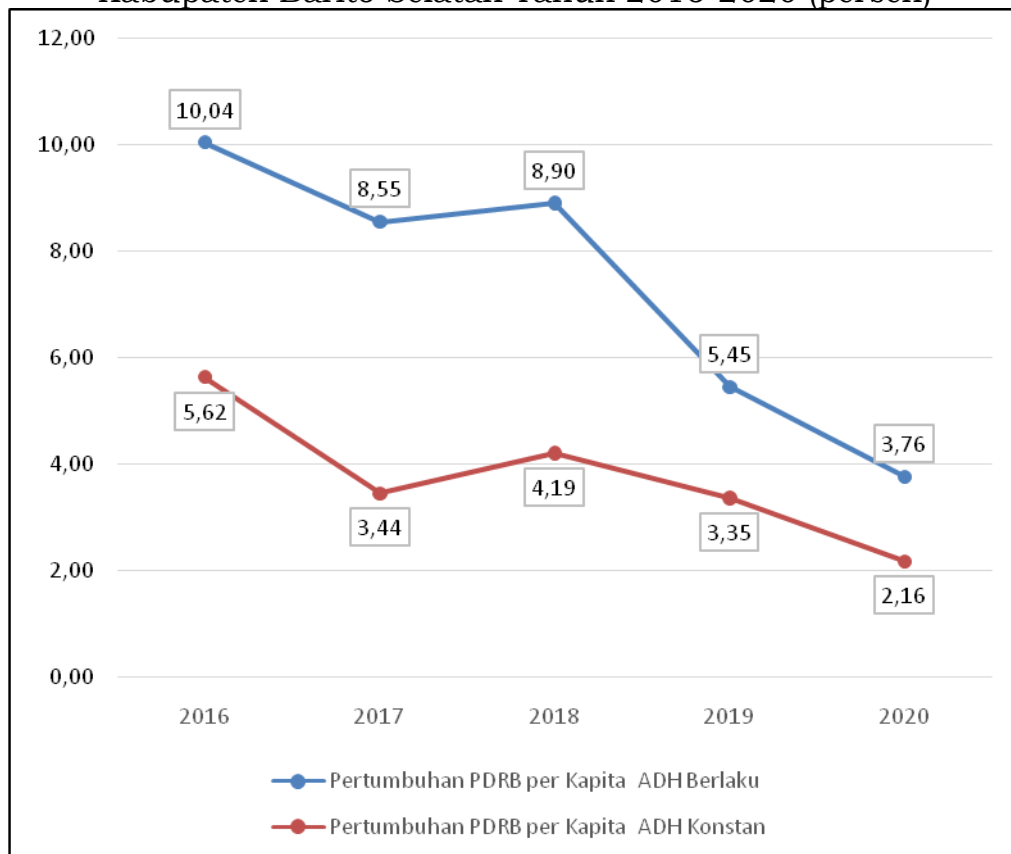
Berdasarkan diagram di atas, Kabupaten Barito Selatan berada pada peringkat 10 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bisa dikatakan, kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam struktur perekonomian regional relatif kecil apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang telah lama berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kondisi ini penting untuk menjadi perhatian dalam upaya merumuskan kebijakan

yang berdampak baik secara langsung dan tidak langsung untuk mendorong perkembangan perekonomian makro di Kabupaten Barito Selatan.

#### 2.1.1.4. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Tren perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.4**  
Perkembangan PDRB per Kapita  
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dari Beberapa Edisi, diolah

Perkembangan secara riil PDRB per kapita Barito Selatan atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Selama periode 2016-2020, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada

tahun 2020 mencapai Rp.47.913.740 atau tumbuh sebesar 3,76 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Selanjutnya, terkait PDRB per kapita atas dasar harga konstan, juga relatif mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu 2016-2020. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADH Berlaku(milyar rupiah)	4889,3	5410	5943,7	6362,8	6276,7
Jumlah Penduduk	131.987	134.543	135.736	137.796	131.000
PDRB per Kapita (juta rupiah)	37.043.800	40.210.193	43.788.678	46.175.506	47.913.740
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Berlaku	10,04	8,55	8,90	5,45	3,76
PDRB ADH Konstan (milyar rupiah)	3754,1	3958,3	4160,9	4365,7	4240,2
Jumlah Penduduk	131.987	134.543	135.736	137.796	131.000
PDRB per Kapita (juta rupiah)	28.442.953	29.420.334	30.654.358	31.682.342	32.367.939
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Konstan	5,62	3,44	4,19	3,35	2,16

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020, diolah*

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Barito Selatan yang relatif cukup besar, tidak bisa dijadikan suatu tolak ukur yang bersifat tunggal untuk menyatakan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan berada pada tingkat kesejahteraan yang tinggi mengingat masih tetap relatif tingginya disparitas pendapatan di Kabupaten Barito Selatan yang ditunjukkan oleh indeks gini yang berada pada angka 0,32 atau berada dalam kondisi ketimpangan pendapatan moderat.

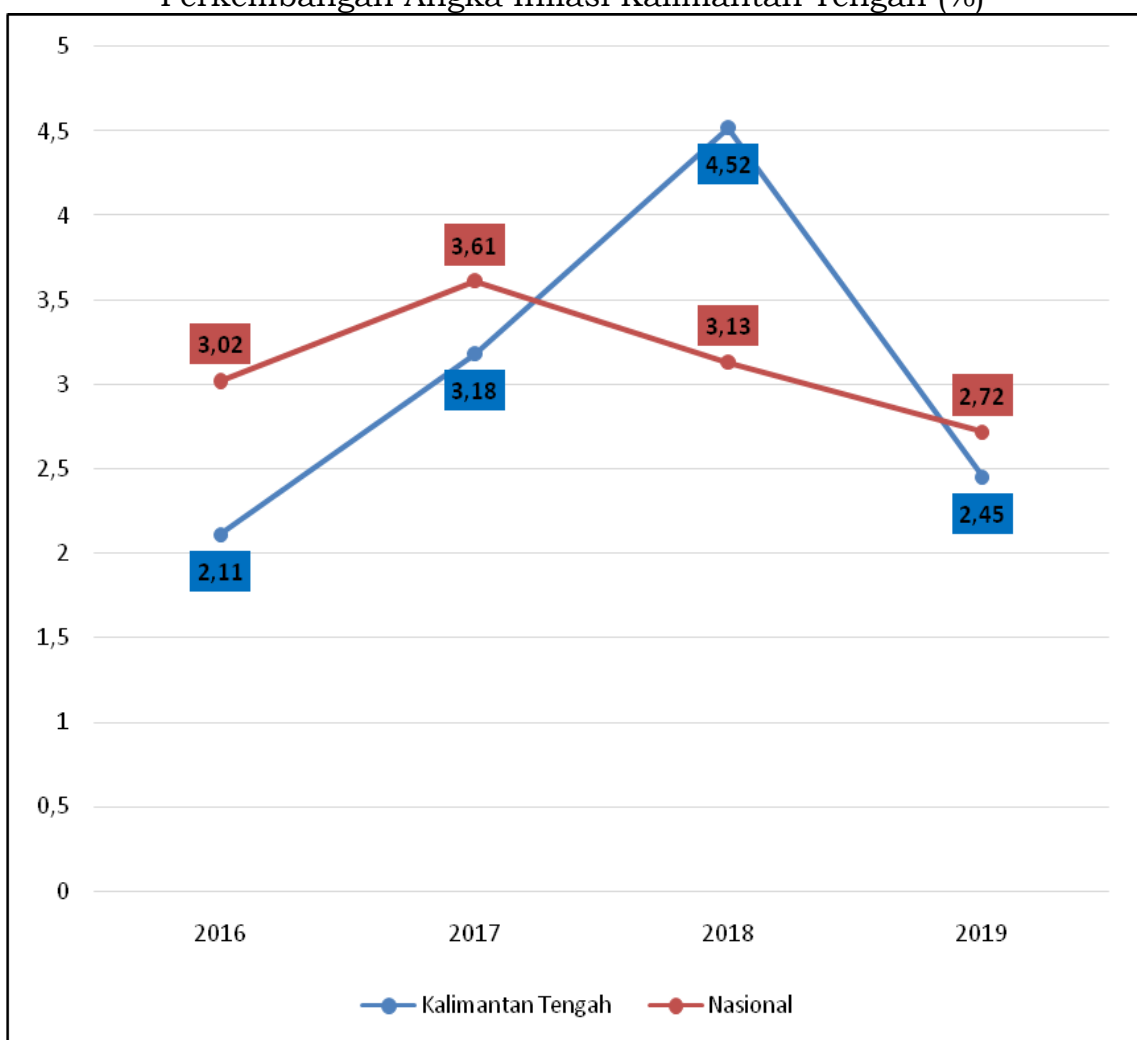
#### **2.1.1.5. Laju Inflasi**

Laju inflasi merupakan angka indikator yang menunjukkan kenaikan harga umum secara terus menerus dalam periode tertentu, sedangkan deflasi menunjukkan terjadi penurunan harga barang-barang dan jasa secara umum. Untuk angka Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen. Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan angka inflasi, diwakilkan oleh dua kota yakni Kota Palangka raya dan Kota Sampit yang menjadi tolak ukur



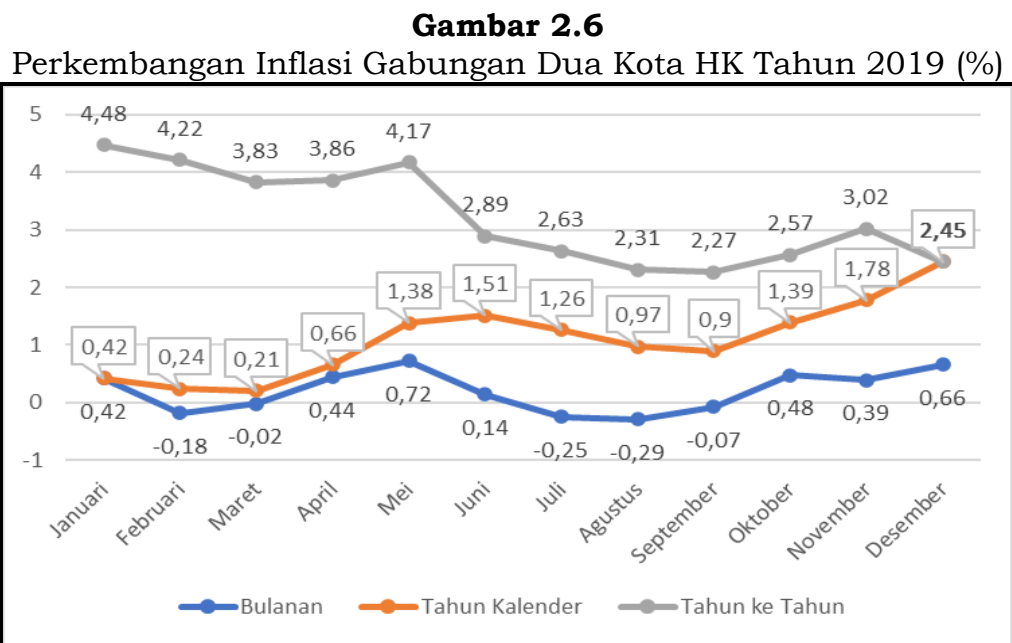
perhitungan angka inflasi umum Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait laju inflasi tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016-2019 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018, melampaui laju inflasi nasional dengan angka 4,52 persen atau merupakan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2019, laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah kembali turun ke angka 2,45 dan di bawah laju inflasi nasional Berikut perkembangan angka inflasi umum untuk Provinsi Kalimantan Tengah. dari tahun 2016-2019.

**Gambar 2.5**  
Perkembangan Angka Inflasi Kalimantan Tengah (%)



Sumber : Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Tengah, diolah dari beberapa edisi

Sementara itu, jika melihat pola inflasi bulanan pada tahun 2019, inflasi Kota Palangka Raya dan Kota Sampit menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan disertai tiga kali lonjakan inflasi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar, terkait dengan perayaan hari keagamaan hingga akhir tahun. Inflasi cukup tinggi terjadi selama April (0,44 persen) dan Mei (0,72 persen) kerana bertepatan dengan Ramadhan dan Idul Fitri. Inflasi yang cukup tinggi juga terjadi selama Desember (0,66 persen) yang bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Siklus harga musiman ini relatif selalu terjadi setiap tahun. Selain mengalami fluktuasi inflasi, selama tahun 2019 juga diwarnai lima kali deflasi yakni selama Februari (0,18 persen), Maret (0,02 persen), Juli (0,25 persen), Agustus (0,29 persen) dan September (0,07 persen) Terkait laju inflasi gabungan dua kota (Palangkaraya dan Sampit) bisa dilihat pada gambar berikut ini.



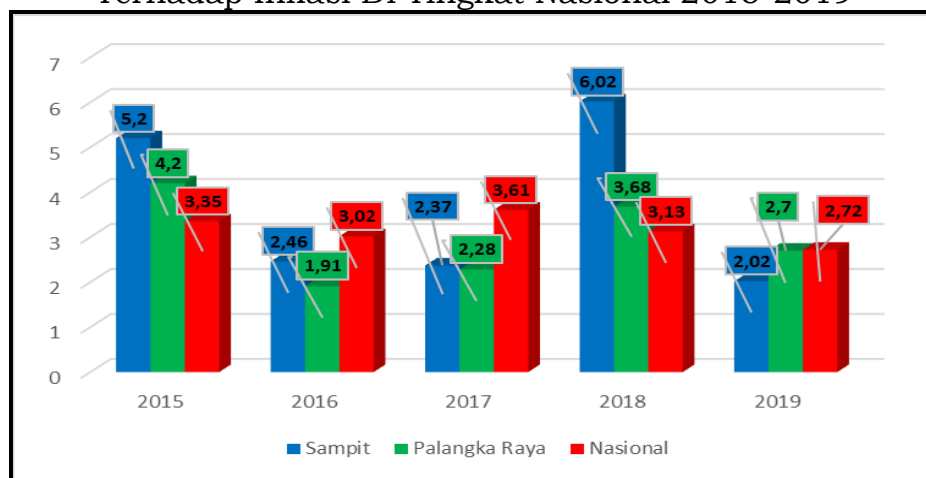
Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Sampit, 2019

Secara umum, apabila melihat pola inflasi tahunan selama 2015-2019, inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, tingkat inflasi di dua kota tersebut cenderung berada di bawah inflasi pada tingkat nasional (2,72 persen) yang mana juga merupakan angka terendah selama 5 tahun terakhir. Adapun laju inflasi tahun ke tahun untuk Kalimantan Tengah selama 2019 juga lebih rendah dari tahun 2018 (4,52 persen). Terdapat indikasi

bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi. Lonjakan tingkat permintaan barang dan jasa menyebabkan jumlah pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan di pasar konsumen. Hal ini tentu berdampak pada harga yang merangkak naik pada waktu yang sama.

**Gambar 2.7**

Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Dan Kota Sampit Terhadap Inflasi Di Tingkat Nasional 2015-2019



Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Kota Sampit 2015-2019, diolah

#### 2.1.1.6. Angka Kemiskinan

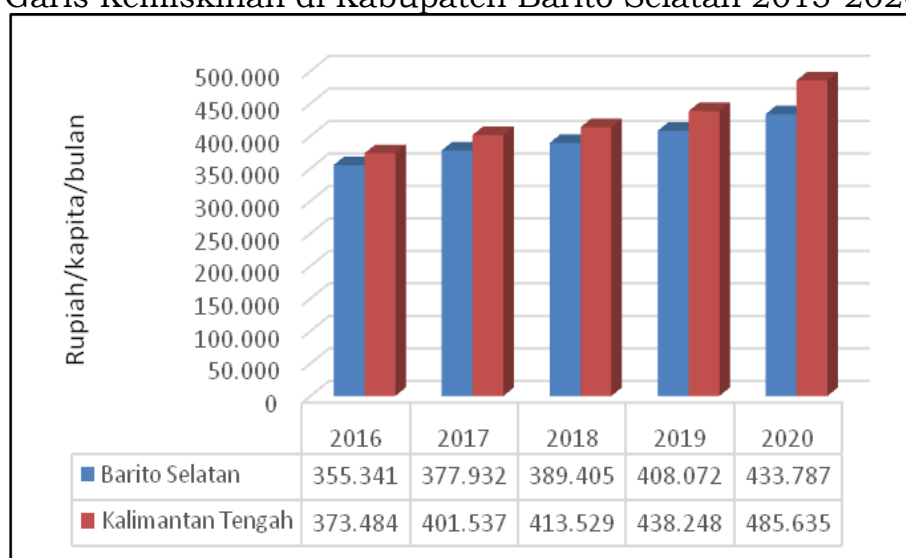
Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan untuk mengelompokkan penduduk miskin

dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.21, garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat dimana pada tahun 2020, garis kemiskinan berada pada angka Rp. 433.787 per kapita per bulan meskipun peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan pada periode tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyentuh angka Rp.485.635 di tahun 2020. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan penduduk miskin.

**Gambar 2.8**

Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan 2015-2020



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2021, diolah

Selanjutnya terkait dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk miskin sebesar pada angka 5.990 jiwa atau sebesar 4,39 persen dibandingkan tahun 2018 yang berada pada angka 6.160 jiwa atau sebesar 4,55 persen. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Selatan kembali mengalami penambahan mencapai angka 6.120 atau sebesar 4,45 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

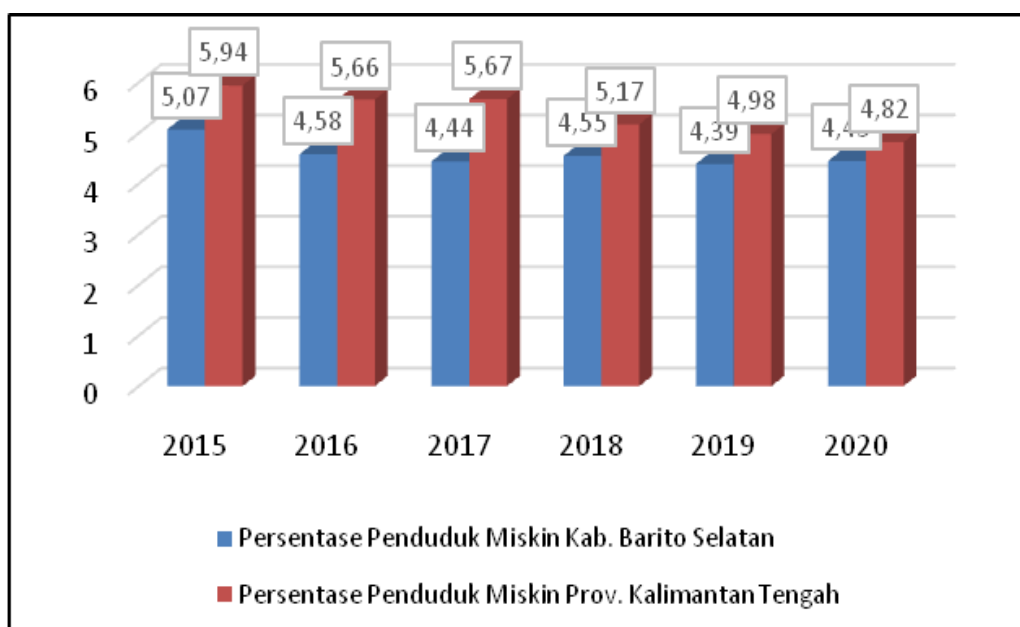
**Tabel 2.7**  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Barito Selatan 2015-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	6.090	5.950	6.160	5.990	6.120
Persentase Penduduk Miskin	4,58	4,44	4,55	4,39	4,45

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020*

Kemudian jika membandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 4,45 persen yang mana sedikit lebih kecil dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 4,82 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.9**  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan  
Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020



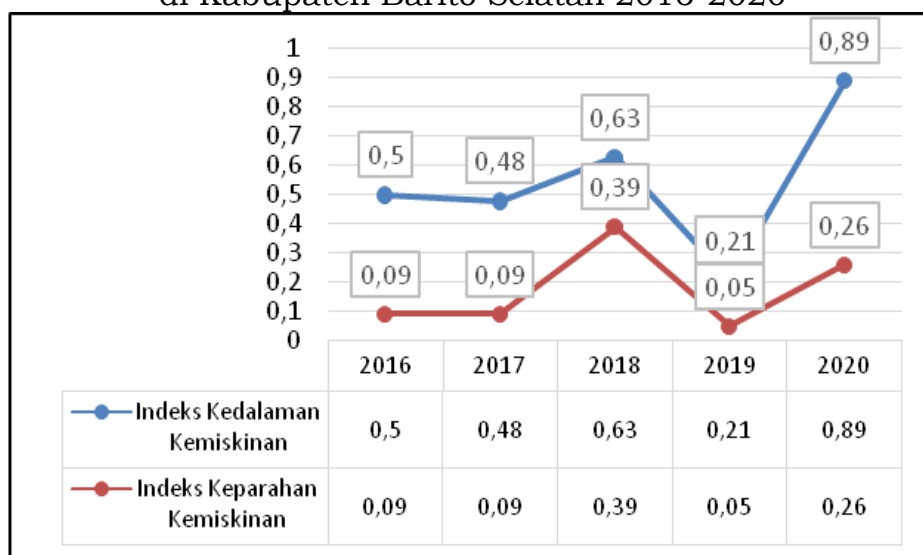
Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2021, diolah

Persoalan kemiskinan bukan hanya terkait dengan jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (poverty gap index) dan tingkat keparahan (poverty severity) dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan pada periode 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif di mana dari tahun 2016 ke tahun 2017 sempat mengalami sedikit penurunan dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan ke angka 0,63 dan kembali turun ke angka 0,21 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan berada pada angka 0,89. Angka Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 mengindikasikan arah kebijakan penanganan kemiskinan sudah berada di jalur yang tepat atau dengan kata lain rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Barito Selatan semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan, juga cenderung fluktuatif di mana pada tahun 2016 hingga tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan masih berada di angka yang sama yakni 0,09 yang kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan ke angka 0,39. Pada tahun 2019 Indeks Keparahan

Kemiskinan kembali turun ke angka 0,05 dan pada tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan kembali naik ke angka 0,26. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 disebabkan oleh fenomena penyebaran virus covid-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian baik ditingkat makro hingga ke tingkat mikro. Perkembangan indeks Kedalaman Kemiskinan dan indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.10**  
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan 2016-2020



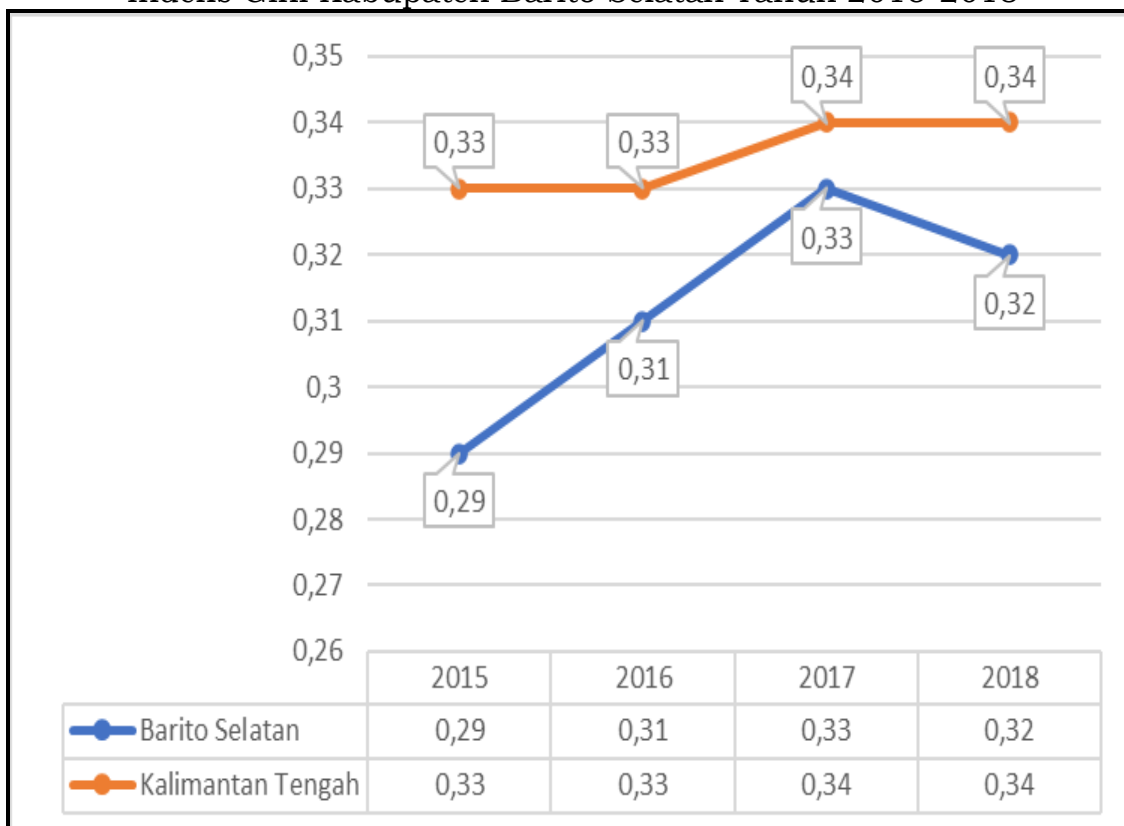
Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020, diolah

#### 2.1.1.7. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Angkarasio

gini Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2018 adalah 0,32 yang berartitermasuk ke dalam kategori ketimpangan pendapatan moderat/ sedang. Angka ini sedikit lebih rendah dari angka rasio gini Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 0,34. Berikut ini gambaran perkembangan rasio gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2018 terhadap Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan indeks gini di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.11**  
Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2018



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020

#### 2.1.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari



komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah),serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Terkait dengan tren perkembangan IPM, Kabupaten Barito Selatan memiliki tren perkembangan yang relatif baik. Hal ini bisa dilihat dari terus meningkatnya angka IPM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana pada tahun 2017, nilai IPM kabupaten Barito Selatan berada pada kisaran angka 69,25 dan pada tahun 2020 berada di angka 70,22 atau berada pada status IPM tinggi. Bisa dikatakan peningkatan IPM di Kabupaten Barito Selatan yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian. Terkait perkembangan IPM di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.8**  
Capaian IPM Kabupaten Barito Selatan

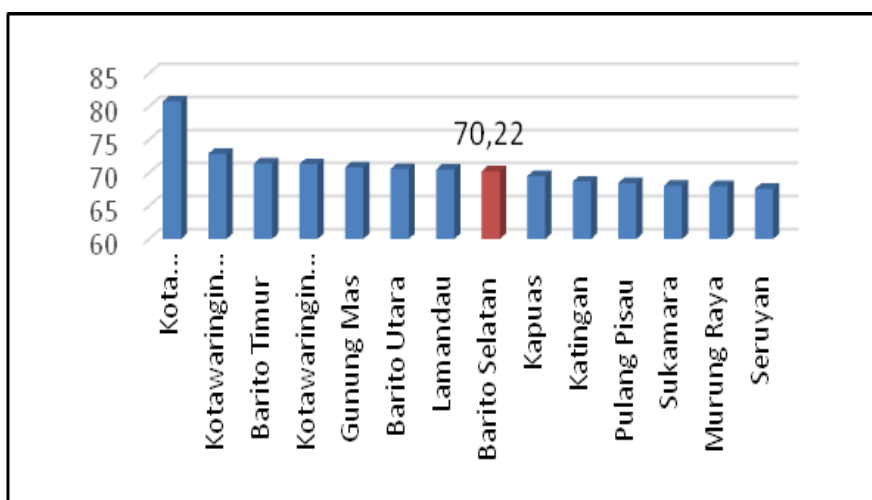
Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	69,25	69,73	70,1	70,22	NA	NA

*Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2020*

Di tahun 2020, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.26, IPM kabupaten Barito Selatan berada di urutan 8 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun kabupaten/kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Palangka Raya yakni sebesar 80,77 serta Kabupaten Seruyan dengan nilai IPM sebesar 67,58 sebagai kabupaten dengan nilai IPM terendah.

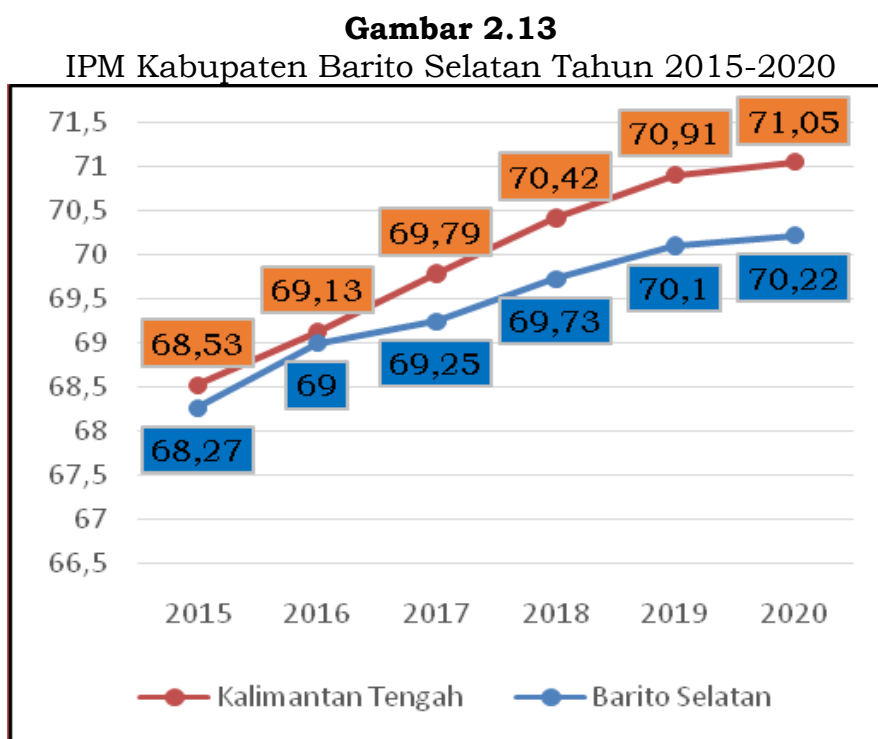
**Gambar 2.12**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2020



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2021

Jika dibandingkan dengan perkembangan nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah, tren perkembangan IPM Kabupaten Barito Selatan masih cenderung berada di bawah tren perkembangan Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2021

## 2.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan

### 1. Telaah Ekonomi Nasional

Pandemi COVID-19 mengakibatkan tekanan terhadap kestabilan perkenomian dan sosial. Pasca pandemi COVID-19, ekonomi global digambarkan akan menuju keseimbangan baru dimana akan terjadi transformasi pada area struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok serta tatanan internasional.

Dari sisi ekonomi tekanan besar terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan, dampak negatif sangat dirasakan masyarakat terutama para pelaku ekonomi dimana pendapatan dan konsumsi masyarakat menurun sangat signifikan karena terbatasnya gerak masyarakat.

Dari sisi investasi diperkirakan akan ikut terdampak diakibatkan oleh terhentinya beberapa aktifitas produksi sehingga neraca keuangan perusahaan terganggu, hal ini tentu akan berdampak pula pada tenaga kerja yang pasti ikut menerima imbasnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 3,49% (yoy) pada triwulan III tahun 2021 kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar minus 5,32% (yoy), hal tersebut menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menuju pada arah zona positif. Hal tersebut di ikuti dengan membaiknya konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2021 yang sebelumnya sebesar minus 5,5% menjadi minus 4%, hal tersebut berkat dukungan belanja pemerintah dalam rangka perlindungan sosial yang meningkat sangat tajam dengan harapan perbaikan ekonomi domestik akan terjadi secara bertahap.

Pada bulan September 2021, Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 minus 1,6 persen. Namun pada bulan Desember 2021 Bank Dunia kembali mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi minus 2,2 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Sementara untuk proyeksi tahun 2021, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia positif 3,1 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen. Koreksi ini mencerminkan pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan untuk kuartal III dan sebagian kuartal keempat akibat pembatasan sosial dan meningkatnya kasus COVID-19.

Meski demikian, Bank Dunia mencatatkan ekonomi Indonesia 2021 akan membaik dan perlahan menguat pada 2022. Hal ini didasarkan pada pembukaan ekonomi tahun depan yang diikuti pembukaan lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan pembatasan sosial sepanjang 2022. Bank Dunia memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada di angka 4,4 persen yang secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta, seiring dengan longgarnya pembatasan sosial. Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat. Di sisi lain, hilangnya pendapatan rumah tangga tetap rendah akibat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang memadai.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2022 diperkirakan menguat ke level 4,8 persen didorong oleh menguatnya konsumsi, investasi dan meningkatnya kepercayaan dengan syarat tersedianya vaksin yang efektif dan aman. Di sisi lain, menurut Bank Dunia proyeksi acuan dasar ini akan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi terkait dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lain.

Bank Dunia mencatat adanya potensi pertumbuhan Indonesia merosot menjadi 3,1 persen pada 2021 dan 3,8 persen pada 2022. Lebih rendah dari skenario terburuk akibat pengetatan PSBB, pertumbuhan global yang lebih lemah dan harga komoditas. Oleh sebab itu, kinerja pertumbuhan jangka menengah Indonesia sangat bergantung pada penanggulangan potensi dampak negatif krisis terhadap investasi, produktivitas dan modal manusia.

Menurut Asian Development Bank (ADB), pemulihan ekonomi Indonesia nantinya akan didorong oleh prospek pemulihan konsumsi swasta, juga disokong oleh keyakinan konsumen yang akan kembali pada zona optimistis. Pemulihan juga akan didorong oleh membaiknya sentimen bisnis yang merupakan hasil dari reformasi iklim investasi, termasuk dengan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Lalu, pemulihan juga akan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang bisa semakin membaik. Hal ini juga seiring dengan prospek pemulihan yang akan terus terjadi pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia dan meningkatnya harga komoditas internasional. Terus ke depan, permintaan domestik diperkirakan baru akan bisa pulih sepenuhnya di tahun

2022. Hal ini yang nantinya bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level sebelum pandemi COVID-19.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadaai gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus

dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e-commerce.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

## **2. Telaah Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah**

Kinerja ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan III 2021 juga mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kalimantan Tengah tercatat kontraksi 3,12% (yoy), meningkat dibanding triwulan II 2021 yang terkontraksi 3,15% (yoy). Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi bersumber dari membaiknya kinerja ekspor ditopang oleh meningkatnya ekspor batu bara dan perbaikan harga CPO global, membaiknya konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, serta meningkatnya pengeluaran pemerintah sejalan dengan realisasi berbagai stimulus fiskal berupa bantuan sosial. Sementara itu dari sisi penawaran, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami perbaikan didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pada era Adaptasi Kebiasaan Baru dan lapangan usaha konstruksi meningkat sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah.

Kinerja perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2021 diperkirakan membaik, didorong kinerja konsumsi rumah tangga. Mulai bangkitnya aktivitas masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru, serta meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang HBKN natal dan tahun baru diperkirakan berdampak terhadap kinerja lapangan usaha utama di Kalimantan Tengah khususnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, serta lapangan usaha konstruksi.

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah secara keseluruhan pada triwulan III 2021 sebesar 69,53%, lebih rendah dibandingkan

triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 72,07%. Rendahnya realisasi pendapatan transfer, dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah menjadi penyebab melambatnya realisasi pendapatan Pemerintah secara keseluruhan pada triwulan III 2021. Realisasi belanja Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah secara keseluruhan pada triwulan III 2021 sebesar 52,08%, lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 52,31%. Rendahnya belanja operasi dan belanja modal menjadi penyebab melambatnya realisasi belanja Pemerintah secara keseluruhan pada triwulan III 2021.

Tekanan inflasi Kalimantan Tengah triwulan III 2021 mengalami penurunan menjadi 1,42% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 1,86% (yoy). Laju inflasi Kalimantan Tengah sejalan dengan penurunan laju inflasi di tingkat nasional yang tercatat 1,42% (yoy). Secara spasial, inflasi Pulau Kalimantan pada triwulan III 2021 sebesar 1,13% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 1,44% (yoy). Penurunan tekanan inflasi Kalimantan Tengah bersumber dari hampir seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tercatat sebesar 1,91% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,55% (yoy).

Secara umum, pada triwulan III 2021 stabilitas sistem keuangan Kalimantan Tengah mulai menunjukkan perbaikan, walaupun beberapa indikator mengalami penurunan kinerja intermediasi. Pertumbuhan penyaluran kredit di sektor utama perekonomian Kalteng tercatat masih menunjukkan tren penguatan. Penyaluran kredit pada sektor pertanian mengalami pertumbuhan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini juga diikuti penyaluran kredit pada lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan yang tumbuh namun melambat. Sementara itu, penyaluran kredit pada lapangan usaha perdagangan masih berkontraksi walaupun menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, risiko kredit bermasalah perbankan menunjukkan perbaikan yang tercermin dari tren rasio NPL yang menurun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2021 sebesar 4,58% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi kemiskinan di Kalimantan Tengah pada periode Maret

2021 mengalami perbaikan dibandingkan periode Maret 2019. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah adalah sebesar 132.940 jiwa, atau 4,82% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2021 diperkirakan akan didorong oleh bangkitnya aktivitas perekonomian seiring dengan meningkatnya adaptasi masyarakat dalam beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Sementara tekanan inflasi diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat.

### **3. Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan**

Tahun 2022 kondisi perekonomian Barito Selatan diprediksi akan sedikit mengalami keterlambatan, hal ini terjadi sebagai akibat dari efek wabah Pandemi Virus Covid-19 dan krisis perekonomian.

Efek langsung yang dapat dirasakan adalah turunnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan dimaksud, selanjutnya akan berpengaruh terhadap fluktuasi/ tinggi rendahnya permintaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi Barito Selatan.

Untuk pemulihan kondisi sekarang ini diharapkan dalam waktu dekat sektor riil akan bergerak kembali seiring dengan berjalannya proyek-proyek pembangunan pemerintah diberbagai sektor, permintaan terhadap produk/ bahan baku untuk kebutuhan pembangunan lainnya akan meningkat. Dari kegiatan ini nantinya diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran terbuka dapat ditekan dan pendapatan masyarakat meningkat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, target indikator makro untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB 7,8 %.
2. Laju inflasi 3,85%
3. Indeks gini 0,36%.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,1
5. Angka kemiskinan 2,43%



6. Tingkat pengangguran terbuka 4,65%

Namun demikian, memperhatikan kondisi akibat wabah Pandemi Virus Covid-19, kemungkinan besar akan ada penyesuaian target indikator makro antar lain pertumbuhan ekonomi akan diperkirakan 5,6-6,5%, tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,1-3,9%. Kemiskinan berada di angka 4,8-4,3%. Indeks gini rasio berada di 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia di 72,00.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **2.2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2022**

Secara Nasional, sesuai tema RKP 2022 :”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Pembangunan Nasional diarahkan pada 7 (tujuh) fokus pembangunan, yang meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Sedangkan untuk sasaran dan prioritas provinsi pada Tahun 2021 adalah:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;

4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah;
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan;
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat”**.

Tema Pembangunan diatas, merupakan kelanjutan dari 5 (lima) tema pembangunan sebelumnya. Tema pembangunan tahun keenam ini memiliki makna bahwa setelah kita fokus untuk membenahan tata pelayanan publik, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan ditunjang pengamalan agama untuk mencapai Barsel yang bermartabat.

Dalam rangka melaksanakan Tema Pembangunan tersebut pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Pemantapan pelayanan publik bidang infrastruktur wilayah akan dilakukan melalui kebijakan Pemantapan kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti: jalan, jembatan, irigasi, jaringan PLN, jaringan telekomunikasi, perhubungan, sarana dan prasarana air bersih serta infrastruktur lainnya.
- 2) Pemantapan pelayanan publik bidang Pendidikan akan diarahkan untuk mendukung mantapnya sarana dan prasarana pendidikan termasuk guru dan tenaga kependidikan.
- 3) Pemantapan pelayanan publik bidang kesehatan dan Keluarga Berencana akan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan promosi kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca mewabahnya virus covid-19, penyediaan dan perluasan serta pemerataan jangkauan Layanan Keluarga Berencana (KB), Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pencegahan Stunting dalam Program Pembangunan Keluarga serta Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 4) Pemantapan pelayanan publik bidang, pangan, pertanian, dan perikanan diarahkan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan stok pangan daerah menuju swasembada pangan.
- 5) Peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan konsep 3A (Akses, Amenitas, dan Atraksi) sektor pariwisata, didukung promosi dan penyediaan fasilitas wisata yang berkualitas, Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi, Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya serta kesetaraan gender di

instansi pemerintahan dan swasta, serta pemberdayaan ekonomi kreatif lewat UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

- 6) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama dengan prinsip saling menghormati menuju bermasyarakat yang aman dan tenteram.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah dan Peningkatan partisipasi publik melalui kebijakan Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis.
- 8) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN, kebijakan Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik, serta Reformasi Birokrasi di semua lini.

### **2.2.2 Prinsip Penyusunan APBD**

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

### **2.2.3 Kebijakan Penyusunan APBD**

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penerimaan daerah**

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan.

### **2. Pengeluaran daerah**

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan Negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; 3) Surplus/Defisit dan 4) Pembiayaan.

Arah kebijakan keuangan daerah khususnya terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9**  
Struktur Pendapatan Daerah

<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Daerah;</li> <li>b. Retribusi Daerah;</li> <li>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;</li> <li>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.</li> </ol> </li> <li>2. Pendapatan Transfer             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dana Transfer Umum:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Dana Transer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</li> <li>(b) Dana Transer Umum-Dana Alokasi Umum (DBH)</li> <li>(c) Dana Transer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.</li> <li>(d) Dana Transer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;</li> </ol> </li> <li>2) Dana Insentif Daerah (DID);</li> <li>3) Dana Desa.</li> </ol> </li> <li>b. Pendapatan Transfer Antar-Daerah                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan Bagi Hasil; dan</li> <li>2) Bantuan Keuangan.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Hibah;</li> </ol> </li> </ol>
---

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan

Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur pendukung, unsur pendukung, unsur pemerintahan umum dan unsur kewilayahan.

- I. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
  1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
    - A. Dinas Pendidikan.
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
    - A. Dinas Kesehatan.
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    - A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
    - A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
    - A. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
  6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
    - A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    - B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- II. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar.
  1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
    - A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    - A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
  - A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
  - A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
  - A. Dinas Lingkungan Hidup.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil.
  - A. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - A. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
  - A. Dinas Perhubungan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
  - A. Dinas Komunikasi dan Informatika.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
  - A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
  - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
  - A. Dinas Komunikasi dan Informatika.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
  - A. Dinas Komunikasi dan Informatika.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
  - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.
  - A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
  - A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- III. Urusan Pemerintahan Pilihan.
  1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
    - A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
    - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan.
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
    - A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
  4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
    - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
    - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
    - A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
  1. Sekretariat Daerah.
    - A. Sekretariat Daerah.
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.
  1. Perencanaan.
    - A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Keuangan.
    - A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  3. Kepegawaian.
    - A. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
  4. Penelitian dan Pengembangan.
    - A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- VI. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.
  1. Inspektorat Daerah.
    - A. Inspektorat.
- VII. Unsur Kewilayahan.
  1. Kecamatan.

- A. Kecamatan Dusun Hilir.
- B. Kecamatan Dusun Selatan.
- C. Kecamatan Dusun Utara.
- D. Kecamatan Gunung Bintang Awai.
- E. Kecamatan Jenamas.
- F. Kecamatan Karau Kuala.

#### VIII. Unsur Pemerintahan Umum.

- 1. Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, akan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, akan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah selanjutnya dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.10**  
Struktur Belanja Daerah

<p><b>BELANJA DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belanja Operasi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Belanja Pegawai;</li><li>b. Belanja Barang dan Jasa;</li><li>c. Belanja Bunga;</li><li>d. Belanja Subsidi;</li><li>e. Belanja Hibah; dan</li><li>f. Belanja Bantuan Sosial.</li></ol></li><li>2. Belanja Modal<ol style="list-style-type: none"><li>a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;</li><li>b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;</li><li>c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;</li><li>d. Belanja Modal aset tetap lainnya.</li></ol></li><li>3. Belanja Tidak Terduga<ol style="list-style-type: none"><li>a. Belanja Tidak Terduga;</li></ol></li><li>4. Belanja Transfer<ol style="list-style-type: none"><li>a. Belanja Bagi Hasil;</li><li>b. Belanja Bantuan Keuangan.</li></ol></li></ol>
---

### 3. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posisi surplus atau defisit APBD akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

#### 4. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.11**  
Struktur Pembiayaan Daerah

PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Penyertaan Modal Daerah;
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

### BAB III

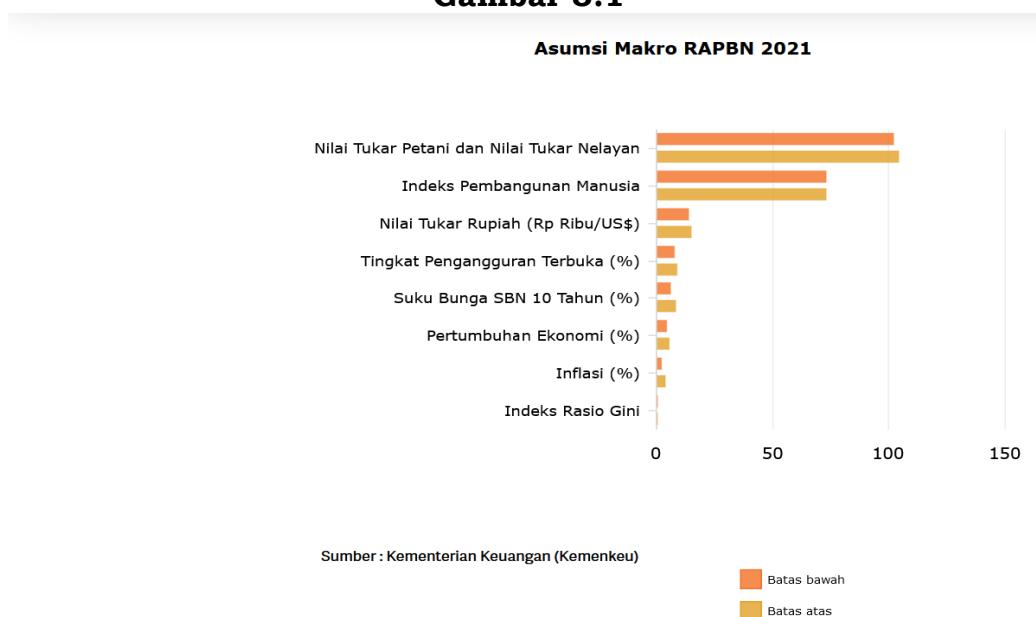
## ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

### 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi makro ekonomi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022 telah disepakati pemerintah bersama Komisi XI DPR RI. Kedua pihak sepakat pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 4,5% sampai 5,5%. Lalu, tingkat inflasinya 2% sampai 4%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipatok di kisaran Rp 13.700 hingga Rp 14.900. Untuk suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun di 6,29% sampai 8,29%

Tingkat pengangguran terbuka tahun depan di kisaran 7,7% hingga 9,1%. Kemiskinan berada di angka 9,2% sampai 9,7%. Indeks gini rasio berada di 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia di 72.78-72.95. Grafik Databoks berikut ini merangkum asumsi makro tersebut.

**Gambar 3.1**



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi inflasi belum tinggi karena diperkirakan permintaan belum tinggi meski ada pemulihan ekonomi di tengah pandemi corona. Kondisi ekonomi masih rapuh dan tidak pasti. Pemerintah akan terus menjaga dari sisi kebijakan moneter, termasuk

menjaga potensi inflasi dari harga pangan. “Tahun depan diperkirakan akan memiliki musim lebih kering. Oleh karena ituantisipasi keamanan pangan sudah dipersiapkan sejak saat ini.

Untuk pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berharap dapat menjalankan strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2022 yaitu dengan menggerakkan investasi, industri dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi, seperti yang disampaikan oleh Plt Kasubdit Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Kementerian PPN/Bappenas M. Firman Hidayat dalam seminar daring di Jakarta. Melalui strategi pemulihan ini, pemerintah juga berupaya untuk bisa menjaga dan meningkatkan permintaan, karena dalam kondisi pascacovid masyarakat juga masih perlu mendapatkan bantuan dan adaptasi untuk bisa menyesuaikan kembali dengan kondisi perekonomian yang normal.

Saat ini Bappenas masih berfokus menjalankan strategi penyelamatan nasional yang terdiri dari upaya untuk melandaikan kurva pandemi melalui penguatan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga melalui strategi penyelamatan dari sisi perekonomian berupaya melandaikan kurva resesi, serta bisa melindungi kelompok masyarakat rentan, miskin dan pengangguran serta bagaimana mencegah dunia usaha untuk tidak mengalami kebangkrutan yang lebih besar. Dengan demikian penurunan PHK juga bisa ditekan. Selain itu melalui strategi penyelamatan ini, pemerintah pusat juga berusaha mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan.

Selanjutnya asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
Asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun 2022

<b>Indikator Ekonomi</b>	<b>Asumsi</b>
<b>1. Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>4,5 - 5,5 %</b>
<b>2. Tingkat Inflasi (%)</b>	<b>2 - 4 %</b>
<b>3. Nilai Tukar Rupiah per USD</b>	<b>Rp14.900 – Rp14.500</b>

<b>4. Penurunan Angka Kemiskinan (%)</b>	<b>8,5 – 9,5 %</b>
<b>5. Indeks Gini Rasio</b>	<b>0,377 – 0,379 %</b>

### 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan didalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Asumsi yang digunakan untuk Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022

<b>INDIKATOR</b>	<b>Target Kalteng 2022 (RKPD)</b>	<b>Target Barsel 2022 (RPJMD)</b>	<b>Target Barsel 2022 (Penyesuaian)</b>
<b>Pertumbuhan ekonomi</b>	<b>5,5-6,5 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>4,5%-5,5%</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4,40 %</b>	<b>5,5%-6,5%</b>
<b>Angka kemiskinan</b>	<b>4,44 %</b>	<b>3,91 %</b>	<b>5,0%-5,5%</b>
<b>Laju inflasi</b>	<b>2,5-3,0 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Gini Ratio (Indeks)</b>	<b>0,330</b>	<b>0,35</b>	<b>0,377-0,379</b>
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>73,50 %</b>	<b>72,22 %</b>	<b>72,00</b>

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022.**

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp1.002.010.164.746,13 Pendapatan Daerah tersebut apabila kita bandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp985.494.991.104,00 maka terlihat terjadi kenaikan sebesar Rp16.515.173.642,13 atau 1,68 persen.

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Pendapatan Transfer; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, Pendapatan Transfer mengalami penurunan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap.

Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp98.065.794.810,13 bertambah sebesar Rp2.287.701.402,13 atau 2,39 persen dibanding dengan target tahun 2021 yaitu sebesar Rp95.778.093.408,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

##### **1.1. Pajak Daerah**



Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a)Pajak Hotel; b)Pajak Restoran; c)Pajak Hiburan; d)Pajak Reklame; e)Pajak Penerangan Jalan; f)Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; g)Pajak Sarang Burung Walet; h)PBB; dan i)Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah pada APBD Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.567.492.205,00 atau 39,19 persen menjadi Rp30.430.600.000,00 apabila dibandingkan dengan target pada APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp21.863.107.795,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 2) Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 3) Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 4) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp4.700.000.000,00.
- 5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dianggarkan sebesar Rp3.025.000.000,00 atau naik sebesar Rp267.492.205,00 dengan yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp2.757.507.795,00.
- 6) Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp600.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 7) Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 8) BPHTB dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp3.000.000.000,00 bila dibandingkan yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00.
- 9) Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.

10) Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000.000,00 bila dibandingkan yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00.

## **1.2. Retribusi Daerah**

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Pasar-Kios; d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e) Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran; f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; dan h) Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah bangunan; b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan; c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor; d) Retribusi Tempat Pelelangan; e) Retribusi Terminal; f) Retribusi Tempat Khusus Parkir; g) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan i) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada orang Pribadi; c) Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi; dan d) Retribusi Izin Usaha Perikanan Kepada Orang pribadi.

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp7.133.961.684,00 mengalami penurunan sebesar Rp205.097.480,00 apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.339.059.164,00.

Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp2.520.072.500,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.080.984.250,00. Pada APBD Tahun Anggaran 2022 Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp560.911.750,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp266.311.750,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp99.672.500,00 apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp365.984.250,00.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp74.600.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp37.900.000,00 apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp112.500.000,00.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.412.500.000,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.432.500.000,00.
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan kegiatan baru yang pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.558.049.934,00. Apabila dibandingkan dengan Target Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.233.074.914,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.324.975.020,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.391.387.934,00 naik sebesar Rp213.913.020,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.177.474.914,00.

- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.056.062.000,00 yang mana belum pernah dianggarkan pada Tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.000.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.000.000,00.
- 4) Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 turun sebesar Rp9.000.000,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.000.000,00.
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.723.100.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp80.000.000,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp110.000.000,00.

Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.015.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.025.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp990.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00.

- 2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 3) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp15.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.

### **1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.209.260.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.251.534.669,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.957.726.131,00.

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan Modal Pada BUMD. Target tersebut bersumber terutama dari penerimaan Hasil Dividen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan besaran pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp10.209.260.800,00.

### **1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan ; 2) Jasa Giro; 3) Pendapatan Bunga; 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah; 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 7) Pendapatan dari Pengembalian; 8) Pendapatan BLUD; dan 9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp50.291.972.326,00 menurun sebesar Rp7.326.227.992,00 dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp57.618.200.318,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dianggarkan sebesar Rp607.239.472,00 mengalami penurunan sebesar Rp178.760.528,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp786.000.000,00.
- 2) Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.000.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp700.000.000,00.
- 3) Pendapatan Bunga dianggarkan sebesar Rp4.500.482.999,00 mengalami penurunan sebesar Rp49.700.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.550.182.999,00.
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.
- 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.000.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000,00.
- 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.
- 7) Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp1.700.000.000,00 bertambah sebesar Rp657.500.000,00 dibanding dengan target tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.042.500.000,00.
- 8) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok dianggarkan sebesar Rp37.350.274.460,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.553.123.813,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.797.150.647,00.
- 9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dianggarkan sebesar Rp4.303.975.395,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.388.391.277,00

apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.692.366.672,00.

## **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp896.597.685.989,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp34.969.355.000,00 atau 4,06 persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp861.628.330.989,00 dengan rincian sebagai berikut :

### **2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp34.969.355.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp828.404.599.000,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp863.373.954.000,00 yang terdiri dari:

#### **a. Dana Perimbangan.**

Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp788.151.318.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.138.260.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp741.013.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).**

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp76.659.464.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.890.022.000,00 dibandingkan target Tahun Anggaran 2021 Rp58.769.412.000,00 terdiri dari:

- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp10.467.432.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.505.089.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.962.343.000,00.

- b. DBH PPh Pasal 21 pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp4.576.503.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp71.849.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.504.654.000,00.
  - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp196.378.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp143.360.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.018.000,00.
  - d. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp52.828.915.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.817.444.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.011.471.000,00.
  - e. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp52.828.915.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.817.444.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.011.471.000,00.
  - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp1.918.826.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp790.507.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.128.319.000,00.
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).  
Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp517.055.110.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.107.825.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp534.162.935.000,00.
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.  
Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp93.843.558.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.550.298.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.293.260.000,00.



- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Paud Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.239.347.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.699.635.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp539.712.000,00.
- b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp15.088.794.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.814.369.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.274.425.000,00.
- c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp12.914.216.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.729.567.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.184.649.000,00.
- d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.149.072.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.622.772.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp526.300.000,00.
- e. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.036.939.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp931.878.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.105.061.000,00.
- f. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.786.957.000,00.
- g. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.146.480.000,00.
- h. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Reguler-KB Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp686.678.000,00 mengalami

- penurunan sebesar Rp5.774.384.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.461.062.000,00.
- i. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp858.251.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp543.251.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp315.000.000,00.
  - j. DAK Fisik - Bidang Pertanian - Penugasan - Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.315.655.000,00.
  - k. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp9.501.773.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.585.024.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.086.797.000,00.
  - l. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.736.674.000,00.
  - m. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.532.365.000,00.
  - n. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.987.741.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp402.331.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.585.410.000,00.
  - o. DAK Fisik-Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp9.862.616.000,00.
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.  
Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp93.843.558.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.805.735.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021

sebesar Rp77.787.451.000,00. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terdiri dari:

- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.764.780.000,00.
- b. DAK Non Fisik-TPG PNSD Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp45.661.504.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.575.288.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.236.792.000,00.
- c. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.190.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.644.000.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp546.000.000,00.
- d. DAK Non Fisik-TKG PNSD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.493.282.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp304.406.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.188.876.000,00.
- e. DAK Non Fisik-BOP PAUD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.042.280.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp68.280.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.974.000.000,00.
- f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.193.970.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp286.470.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.907.500.000,00.
- g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.077.014.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.299.973.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.777.041.000,00.
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp406.876.000,00 menurun sebesar Rp62.234.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp469.110.000,00.

- i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp258.745.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.196.879.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.455.624.000,00.
- j. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp412.352.000,00.
- k. DAK Non Fisik-BOKB-KB pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.989.783.000,00.
- l. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp102.600.000,00.

**b. Dana Insentif Daerah (DID)**

Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.659.236.000,00.

**c. Dana Desa**

Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp71.563.400.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.828.141.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.391.541.000,00.

**2.2 Pendapatan Transfer antar-Daerah**

Pendapatan Transfer antar-Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.223.731.989,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021 yaitu:

**a. Pendapatan Bagi Hasil**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari : 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp14.159.263.661,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.

2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.833.483.308,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp8.367.726.339,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp37.900.288,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5.825.358.393,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.

**b. Bantuan Keuangan**

Pendapatan Bantuan Keuangan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2022 masih belum dianggarkan, sebagaimana juga pada asumsi APBD Tahun Anggaran 2021 yang lalu.

**3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp7.346.683.947,00 menurun sebesar Rp20.471.882.760,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.088.566.707,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah.

**3.1 Pendapatan Hibah**

Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp7.346.683.947,00 sama dengan Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari : 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; 2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri; 3) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 sama dengan target Tahun Anggaran 2021.
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri pada Tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,00 sama dengan target Tahun Anggaran 2021.
3. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp3.996.683.947,00 sama dengan target Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 4.1**  
**Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan**  
**Tahun Anggaran 2022**

Jenis Penerimaan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Kenaikan/ (turun)
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>95.778.093.408,00</b>	<b>98.065.794.810,13</b>	<b>2,39 %</b>
Pajak Daerah	21.863.107.795,00	30.430.600.000,00	39,19 %
Retribusi Daerah	7.339.059.164,00	7.133.961.683,75	(2,79) %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.957.726.131,00	10.209.260.800,00	13,97 %
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	57.618.200.318,00	50.291.972.326,38	(12,72) %
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>861.628.330.989,00</b>	<b>896.597.685.989,00</b>	<b>4,06 %</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	828.404.599.000,00	863.373.954.000,00	4,22 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.223.731.989,00	33.223.731.989,00	0 %
<b>Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>28.088.566.707,00</b>	<b>7.346.683.947,00</b>	<b>(73,84) %</b>
Pendapatan Hibah	7.346.683.947,00	7.346.683.947,00	0 %
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>985.494.991.104,00</b>	<b>1.002.010.164.746,13</b>	<b>1,68 %</b>

*Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan*

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kebijakan belanja daerah tahun 2022 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari (1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (3) Urusan Pemerintahan Pilihan; (4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (7) Unsur Kewilayahan; dan (8) Unsur Pemerintahan Umum, yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang terdiri atas (1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (3) Urusan Pemerintahan Pilihan; (4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (7) Unsur Kewilayahan; dan (8) Unsur Pemerintahan Umum, berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; 2)

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil; 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian; 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan meliputi: 1) Sekretariat Daerah; 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi: 1) Perencanaan; 2) Keuangan; 3) Kepegawaian; 4) Penelitian dan Pengembangan. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan meliputi: 1) Inspektorat Daerah. Unsur Kewilayahan meliputi: 1) Kecamatan. Unsur Pemerintahan Umum meliputi: 1) Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur, dan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus



dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.

- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2022 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (AMH dan APS).
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan secara bertahap, menjadi 10 persen sesuai perintah Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
  - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan internet);
  - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
  - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- 6) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung

dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Alokasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp1.002.010.164.746,13 turun sebesar Rp16.515.173.642,13 atau 1,68 persen bila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp985.494.882.760,00.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer.

## **5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.**

### **1. Belanja Operasi.**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp658.500.423.800,62 turun sebesar Rp41.781.258.426,38 atau 5,97 persen bila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp700.281.682.227,00. Belanja Operasi terdiri dari:

#### **1.1 Belanja Pegawai.**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung. Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp438.3739.733,72 turun sebesar Rp18.515.598.052,28 atau 4,05 persen dari yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp457.255.131.786,00.

## **1.2 Belanja Barang dan Jasa.**

Belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp187.464.917.070,00 turun sebesar Rp8.038.761.385,00 atau 4,11 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp195.503.678.455,00.

## **1.3 Belanja Bunga.**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja bunga pada Tahun Anggaran 2022 masih sama dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.247.640.986,00.

## **1.4 Belanja Subsidi.**

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Belanja subsidi yang akan diberikan kepada PDAM pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp683.742.010,90 turun sebesar Rp601.257.989,10 dibandingkan dengan dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.285.000.000,00.

## **1.5 Belanja Hibah.**

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp27.864.590.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp14.197.440.000,00 atau 33,75 persen apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp42.062.030.000,00.

### **1.6 Belanja Bantuan Sosial.**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp428.201.000,00 atau 14,62 persen apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.928.201.000,00.

### **2. Belanja Modal.**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Modal diperkirakan mencapai Rp199.352.961.462,98 turun sebesar Rp1.820.330.509,02 atau 0,90 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp201.146.291.972,00.

### **3. Belanja Tidak Terduga.**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp26.719.777.743,75 meningkat sebesar Rp.23.719.777.743,75 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00.

#### **4. Belanja transfer.**

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp135.164.001.768,78 atau mengalami penurunan sebesar Rp14.890.990.657,22 atau 9,92 persen bila dibandingkan dengan Tahun anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp150.054.992.396,00. Belanja transfer terdiri dari:

##### **4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.**

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) point b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagaimana telah disempurnakan pengaturannya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Pasal 72 Ayat (3), telah ditetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (persen) untuk desa dan dari Retribusi Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.

Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Bagi Hasil dianggarkan Rp3.779.144.338,78 naik sebesar Rp858.927.642,78 atau 29,41 persen apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp2.920.216.696,00.

##### **4.2 Belanja Bantuan Keuangan.**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp131.384.857.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.749.918.300,00 atau 10,70 persen apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp147.134.775.700,00.

Prakiraan target belanja daerah tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1**  
**Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan**  
**Tahun Anggaran 2022**

Jenis Belanja	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>700.281.682.227,00</b>	<b>685.500.423.800,62</b>	<b>(5,97)</b>
Belanja Pegawai	457.255.131.786,00	438.739.533.733,72	(4,05)
Belanja Barang dan Jasa	195.503.678.455,00	187.464.917.070,00	(4,11)
Belanja Bunga	1.247.640.986,00	1.247.640.986,00	(0,00)
Belanja Subsidi	1.285.000.000,00	683.742.010,90	(46,79)
Belanja Hibah	42.062.030.000,00	27.864.590.000,00	(33,75)
Belanja Bantuan Sosial	2.928.201.000,00	2.500.000.000,00	(14,62)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>201.146.291.972,00</b>	<b>199.325.961.462,98</b>	<b>(0,90)</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>26.719.777.743,75</b>	<b>790,66</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>150.054.992.396,00</b>	<b>135.164.001.738,78</b>	<b>(9,92)</b>
Belanja Bagi Hasil	2.920.216.696,00	3.779.144.338,78	29,41
Belanja Bantuan Keuangan	147.134.775.700,00	131.384.857.400,00	(10,70)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.054.482.966.595,00</b>	<b>1.019.710.164.746,13</b>	<b>(3,30)</b>

### 5.3 Pagu Perangkat Daerah

Berikut ini pagu Belanja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana pada Tabel 5.2 berikut ini :

**Tabel 5.2**  
**Rincian Pagu Belanja Langsung Perangkat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

NO	PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2021	TAHUN 2022	SELISIH (LEBIH/KURANG)
1	Dinas Pendidikan	260.977.077.266,00	266.599.208.962,00	5.622.131.696,00

2	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	179.614.604.089,00	176.401.218.322,00	(3.213.385.767,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	178.199.406.643,00	141.365.407.300,00	(36.833.999.343,00)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.009.264.467,00	7.205.653.441,00	(803.611.026,00)
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.722.894.499,00	4.933.493.518,00	(789.400.981,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.882.803.968,00	9.716.378.259,00	(2.166.425.709,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.228.784.380,00	4.477.394.797,00	248.610.417,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.716.715.682,00	4.138.175.456,00	(578.540.226,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	26.214.910.558,00	25.348.382.214,00	(866.528.344,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.640.174.155,00	9.380.830.000,00	(259.344.155,00)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.931.570.932,00	4.618.346.057,00	(313.224.875,00)
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.685.539.162,00	66.798.136.038,00	1.112.596.876,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.416.608.091,00	7.093.185.486,00	(323.422.605,00)
14	Dinas Perhubungan	7.832.324.011,00	11.431.321.912,00	3.598.997.901,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.624.371.558,00	5.762.294.890,00	(862.076.668,00)
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	7.378.914.745,00	6.839.380.086,00	(539.534.659,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.984.253.789,00	5.920.324.774,00	(63.929.015,00)
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	7.928.292.504,00	4.784.634.363,00	(3.143.658.141,00)
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.311.032.701,00	5.535.751.942,00	1.224.719.241,00
20	Sekretariat Daerah	37.222.270.530,00	25.813.538.774,00	(11.408.731.756,00)
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31.744.107.304,00	29.237.222.541,00	(2.506.884.763,00)
22	Kecamatan Dusun Selatan	6.953.837.647,00	7.412.369.407,00	458.531.760,00
23	Kecamatan Dusun Hilir	3.131.165.010,00	3.003.472.615,00	(127.692.395,00)
24	Kecamatan Dusun Utara	4.476.516.941,00	3.598.921.097,00	(877.595.844,00)

25	Kecamatan Gunung Bintang Awai	2.875.114.324,00	3.320.580.760,00	445.466.436,00
26	Kecamatan Karau Kuala	3.165.613.208,00	3.397.171.253,00	231.558.045,00
27	Kecamatan Jenamas	3.963.058.298,00	3.156.453.951,00	(806.604.347,00)
28	Inspektorat	8.666.217.612,00	7.600.975.736,00	(1.065.241.876,00)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	8.097.403.688,00	7.200.126.876,00	(897.276.812,00)
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	130.613.263.378,00	151.508.901.214,00	20.895.637.836,00
31	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM	6.274.855.455,00	6.110.912.705,00	(163.942.750,00)
	<b>J U M L A H</b>	<b>1.054.482.966.595,00</b>	<b>1.019.710.164.746,00</b>	<b>(34.772.801.849,00)</b>

#### 5.4 Pagu Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Adapun pagu Belanja menurut urusan yang dibagi berdasarkan (1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (3) Urusan Pemerintahan Pilihan; (4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (7) Unsur Kewilayahan; dan (8) Unsur Pemerintahan Umum dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Proyeksi Belanja Urusan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp606.124.346.371,00 atau sebesar 59,44 % dari total belanja, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

##### a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp266.599.208.962,00. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

##### b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp176.401.218.322,00. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.



**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp141.365.407.300,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.063.738.731,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp14.193.773.056,00. Dilaksanakan oleh 1) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp501.000.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

**2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp147.547.321.668,00 atau sebesar 14,47% dari total belanja, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:

**a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.988.175.456,00. Dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp324.806.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp17.048.118.314,00. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp141.914.710,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp9.380.830.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.618.346.057,00. Dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

**g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp66.297.136.038,00. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

**h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.768.379.486,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

**i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp11.431.321.912,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

**j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.677.294.890,00. Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

**k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.771.412.726,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

**l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.920.324.774,00. Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

**m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.371.652.413,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

**n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

**o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00. Dilaksanakan Oleh Dinas Kominfo Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

**p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp186.856.950,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

**q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.453.766.062,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

**r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp81.985.880,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

**3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

Proyeksi Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan adalah sebesar Rp9.744.356.260,00 atau sebesar 0,96% dari total belanja, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

**a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.071.300.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp226.125.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.228.963.900,00. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp689.888.960,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

**e. Urusan Perindustrian**

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp378.078.400,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

**f. Urusan Transmigrasi**

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

**4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp55.050.761.315,00 atau sebesar 5,40%. meliputi 2 (dua) urusan yakni:

**a. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp25.813.538.774,00. Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**b. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp29.237.222.541,00. Dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan.

**5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp164.819.940.795,00 atau sebesar 14,24% meliputi 4 (empat) urusan yakni:

**a. Perencanaan**

Perencanaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.157.126.876,00. Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**b. Keuangan**

Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp151.508.901.214,00. Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**c. Kepegawaian**

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.110.912.705,00. Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

**d. Penelitian dan Pengembangan**

Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp43.000.000,00. Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

**6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.600.975.736,00 atau sebesar 0,75%. Dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

**7. Unsur Kewilayahan**

Belanja Unsur Kewilayahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp23.888.969.083,00 atau sebesar 2,34%. Dilaksanakan oleh Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Jenamas, Kecamatan Gunung Bintang Awai, dan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

**8. Unsur Pemerintahan Umum**

Belanja Unsur Pemerintahan Umum pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.933.493.518,00 atau sebesar 0,48%. Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

**Tabel 5.3**

Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022

**5.5 SURPLUS/DEFISIT**

Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan kebijakan Defisit sebesar Rp17.700.000.000,00. Defisit tersebut nantinya akan

ditutupi dengan Surplus pembiayaan netto yang mengalami kelebihan sebesar Rp17.700.000.000,00.



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>266.599.208.962</b>	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0 000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>266.599.208.962</b>	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0 000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>266.599.208.962</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>201.901.894.692</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>125.909.400</b>	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.909.400	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>198.294.131.602</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	198.294.131.602	
<b>1.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>418.993.000</b>	
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	418.993.000	
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>210.348.000</b>	
1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	210.348.000	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>769.837.920</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.173.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.891.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.249.920	
1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438.540.000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	29.984.000	
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>248.422.450</b>	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.422.450	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.740.983.320</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.067.320	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.480.920.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.269.000</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.154.500	
1.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.817.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	43.297.500	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>64.612.384.370</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>33.869.275.090</b>	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	891.744.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	880.000.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.114.043.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.204.004.000	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	697.661.000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	255.346.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.495.000.000	
<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>		<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	217.699.940	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	540.380.960	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	49.999.820	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.292.289.700	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	322.292.710	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.358.814.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.999.960	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>21.716.933.280</b>	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.900.000.000	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	300.000.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	320.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	350.000.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.838.976.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	323.095.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	205.240.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49.997.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	164.905.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	1.408.254.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	96.497.880	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	269.011.400	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	84.991.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.405.966.000	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>7.763.206.000</b>	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	550.313.000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.256.381.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	432.653.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	14.990.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.178.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	117.050.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	171.539.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.042.280.000	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>1.262.970.000</b>	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.000.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	39.000.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.193.970.000	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>1.01.03.2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>25.000.000</b>	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	25.000.000	
<b>1.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>59.929.900</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	59.929.900	
--------------	--	------------	--

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
	2	3	4
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	59.929.900	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>176.401.218.322</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>176.401.218.322</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>176.401.218.322</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>115.476.360.976</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>269.087.165</b>	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.105.165	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	89.982.000	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>77.042.866.054</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.519.741.554	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.390.560.000	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.874.000	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.991.500	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	52.699.000	
<b>1.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>74.999.920</b>	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	74.999.920	
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>70.303.000</b>	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44.983.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.320.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>331.858.800</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.956.400	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.968.400	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.998.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.990.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.947.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>306.950.577</b>	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.952.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.998.577	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>30.016.000</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.016.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>37.350.279.460</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37.350.279.460	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>60.175.729.516</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.914.238.560</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	6.059.616.000	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	10.786.957.000	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	467.999.750	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	3.729.998.810	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.661.251.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.146.480.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.061.936.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.116.490.956</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.993.200	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.455.624.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	67.407.600	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.958.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.960.740	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	65.173.440	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	83.878.990	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	815.169.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	285.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	45.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.044.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	44.999.600	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	35.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	177.660.950	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.019.915.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2.744.366.245	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	17.725.903.395	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	334.999.796	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.026.437.000	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.000.000</b>	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit	20.000.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.000.000	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>85.000.000</b>	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>85.000.000</b>	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	85.000.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>529.109.460</b>	
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>19.999.760</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	19.999.760	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>325.168.860</b>	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri	325.168.860	
<b>1.02.04.2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>183.940.840</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang	183.940.840	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>135.018.370</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas</b>	<b>35.000.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah</b>	<b>60.000.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.000.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat</b>	<b>40.018.370</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	40.018.370	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN</b>	<b>141.365.407.300</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>141.365.407.300</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>141.365.407.300</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>10.765.654.300</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	50.000.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.831.397.252</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.227.597.252	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	446.200.000	
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	157.600.000	
<b>1.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>170.000.000</b>	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>551.257.048</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.000.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.257.048	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.713.000.000</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	765.600.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	892.400.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>13.641.741.000</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.694.000.000</b>	
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	200.000.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	800.000.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.950.000.000	
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	100.000.000	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	644.000.000	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.947.741.000</b>	
1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	9.847.741.000	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	100.000.000	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>11.641.674.000</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.641.674.000</b>	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	540.000.000	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	315.000.000	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	50.000.000	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.736.674.000	
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>700.000.000</b>	
<b>1.03.04.2.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>700.000.000</b>	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	600.000.000	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>5.267.365.000</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.267.365.000</b>	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.932.365.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	150.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	185.000.000	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.000.000	
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>5.912.600.000</b>	
<b>1.03.07.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.912.600.000</b>	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.912.600.000	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>14.531.200.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14.531.200.000	
--------------	---	----------------	--



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12.531.500.000	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.999.700.000	
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>3.681.900.000</b>	
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.681.900.000</b>	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	454.000.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.227.900.000	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>73.398.273.000</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>73.398.273.000</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.223.800.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	3.664.300.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	65.860.173.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	200.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.300.000.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	400.000.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	150.000.000	
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	600.000.000	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>825.000.000</b>	
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>190.000.000</b>	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	190.000.000	
<b>1.03.11.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>212.700.000</b>	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	42.200.000	
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	150.000.000	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	20.500.000	
<b>1.03.11.2.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>37.300.000</b>	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	37.300.000	
<b>1.03.11.2.04</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>385.000.000</b>	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	385.000.000	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>900.000.000</b>	
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>450.000.000</b>	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	350.000.000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>250.000.000</b>	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	140.000.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	110.000.000	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	200.000.000	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>7.063.738.731</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>	<b>7.063.738.731</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.063.738.731	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.514.856.881	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.698.900</b>	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.698.900	
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.483.979.461</b>	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.483.979.461	
<b>1.04.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.057.300</b>	
1.04.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.057.300	
<b>1.04.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>71.800.200</b>	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.750.000	
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.050.200	
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>283.693.000</b>	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.800.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.705.000	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.492.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.560.000	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.211.600	
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.924.400	
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.535.486.820</b>	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.570.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	857.926.820	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.390.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.600.000	
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.141.200</b>	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.141.200	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>48.000.000</b>	
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>23.000.000</b>	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	23.000.000	
<b>1.04.02.2.06</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>25.000.000</b>	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25.000.000	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>149.999.900</b>	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>50.000.000</b>	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	50.000.000	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>99.999.900</b>	
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	99.999.900	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>350.881.950</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>350.881.950</b>	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	22.910.800	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	118.497.500	
-----------------	--	-------------	--

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	209.473.650	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>14.193.773.056</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>9.716.378.259</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>9.716.378.259</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.640.428.309</b>	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.310.008.259</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.310.008.259	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>189.420.000</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.420.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>116.000.050</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.000.050	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1.542.559.200</b>	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>397.139.200</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	229.500.200	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	37.639.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.000.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	40.000.000	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>1.145.420.000</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.750.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.091.920.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.750.000	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1.533.390.750</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.533.390.750</b>	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.528.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52.652.900	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	378.360.700	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.074.849.150	
<b>1.06.1.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>4.477.394.797</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.06.1.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>4.477.394.797</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.527.617.197</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.036.200</b>	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.036.200	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.263.235.146</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.252.854.246	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.380.900	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.078.000</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.235.000	
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.843.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>323.418.048</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.463.348	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.574.700	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.200.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	104.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.140.000	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>110.310.970</b>	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.310.970	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>641.958.333</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.098.333	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.260.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>122.580.500</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.534.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.296.500	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>594.859.750</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>45.000.000</b>	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	20.000.000	
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>249.859.750</b>	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	20.000.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	30.000.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	124.859.750	
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	50.000.000	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>300.000.000</b>	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	215.000.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	85.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	354.917.850	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	354.917.850	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	354.917.850	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>501.000.000</b>	
<b>1.06.2.13.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>501.000.000</b>	
<b>1.06.2.13.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>501.000.000</b>	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>51.500.000</b>	
<b>1.06.02.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>31.500.000</b>	
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	31.500.000	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>122.900.000</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>75.000.000</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	25.000.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20.000.000	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>47.900.000</b>	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	47.900.000	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>218.400.000</b>	
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>40.000.000</b>	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	40.000.000	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>178.400.000</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.400.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	91.500.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	42.500.000	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>38.000.000</b>	
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>38.000.000</b>	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	38.000.000	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>70.200.000</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>70.200.000</b>	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	70.200.000	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>3.988.175.456</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>3.988.175.456</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>3.988.175.456</b>	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.648.175.456</b>	
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.701.447.736</b>	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.574.087.736	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.180.000	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	117.180.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.07.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	
<b>2.07.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19.800.000</b>	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.800.000	
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>108.440.320</b>	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.693.000	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.650.320	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.997.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.700.000	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.900.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.980.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.520.000	
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>96.294.000</b>	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.624.000	
2.07.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15.180.000	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.490.000	
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>622.178.400</b>	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.578.400	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.600.000	
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
<b>2.07.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>35.015.000</b>	
2.07.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	35.015.000	
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>2.07.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>20.000.000</b>	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	20.000.000	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>65.000.000</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	45.000.000	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>10.000.000</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.000.000	
<b>2.07.03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.000.000</b>	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.000.000	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>80.000.000</b>	
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>60.000.000</b>	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	15.000.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	45.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>150.000.000</b>	
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>38.180.000</b>	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5.000.000	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	5.000.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	28.180.000	
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>111.820.000</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.820.200	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.800	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	7.500.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>324.806.000</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>324.806.000</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>324.806.000</b>	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>40.204.000</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>40.204.000</b>	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	15.120.000	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	25.084.000	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>39.715.000</b>	
<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>19.722.000</b>	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.722.000	
<b>2.08.03.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.993.000</b>	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.993.000	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>99.835.000</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34.495.000</b>	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34.495.000	
<b>2.08.04.2.03</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65.340.000</b>	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.340.000	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>145.052.000</b>	
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.052.000</b>	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.052.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	17.048.118.314	
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	17.048.118.314	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>17.048.118.314</b>	
<b>2.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.651.518.314</b>	
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>277.484.550</b>	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.034.350	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.450.200	
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.679.733.801</b>	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.554.733.801	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75.000.000	
<b>2.09.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>65.000.000</b>	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.000.000	
<b>2.09.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>421.600.000</b>	
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	421.600.000	
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>984.526.923</b>	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.200.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	652.326.923	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>174.173.040</b>	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.173.040	
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.000.000</b>	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000	
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>42.600.000</b>	
<b>2.09.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.600.000</b>	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	42.600.000	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>183.000.000</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>110.000.000</b>	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	30.000.000	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	60.000.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	20.000.000	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>73.000.000</b>	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	48.000.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	25.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	146.000.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000	
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>126.000.000</b>	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.000.000	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>141.914.710</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>	<b>141.914.710</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>	<b>141.914.710</b>	
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>44.420.000</b>	
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>44.420.000</b>	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.710.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.710.000	
<b>2.10.06</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>48.687.555</b>	
<b>2.10.06.2.01</b>	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48.687.555</b>	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	28.772.105	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	19.915.450	
<b>2.10.09</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>39.396.155</b>	
<b>2.10.09.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>39.396.155</b>	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	39.396.155	
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>9.411.000</b>	
<b>2.10.10.2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.411.000</b>	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	9.411.000	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>9.380.830.000</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>9.380.830.000</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>9.380.830.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.895.180.656</b>	
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>41.549.000</b>	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.333.000	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.216.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.000.000	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.747.447.536</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.747.447.536	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>202.659.120</b>	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.949.760	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.560.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.400.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.250.000	
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.499.360	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>692.986.000</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.386.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.100.000	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>210.539.000</b>	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.857.500	
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.681.500	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	200.000.000	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>270.198.258</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>169.198.258</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	59.312.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.886.258	
<b>2.11.03.2.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.000.000	
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>76.000.000</b>	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	76.000.000	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>36.649.900</b>	
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>36.649.900</b>	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.649.900	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	25.000.000	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>142.600.000</b>	
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>142.600.000</b>	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.800.000	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	53.800.000	
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>45.000.000</b>	
<b>2.11.07.2.01</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>20.600.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	20.600.000	
-----------------	---	------------	--

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.11.07.2.02</b>	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>24.400.000</b>	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	24.400.000	
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>85.820.000</b>	
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>85.820.000</b>	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	46.800.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	39.020.000	
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.000.000	
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>57.000.000</b>	
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>57.000.000</b>	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	32.000.000	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>3.628.381.186</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>3.628.381.186</b>	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	39.200.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	159.633.636	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.948.400.650	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	381.146.900	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.618.346.057</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.618.346.057</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.618.346.057</b>	
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.258.852.817</b>	
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>33.119.980</b>	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.119.980	
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.749.736.378</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.749.736.378	
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>35.612.760</b>	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.612.760	
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.014.600.910</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.700	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.659.870	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.954.900	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.366.660	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.998.000	
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.319.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.935.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	307.367.780	
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16.841.050</b>	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.850.000	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.991.050	
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>367.573.539</b>	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.920.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.053.539	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.600.000	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.368.200</b>	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.444.650	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.950.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.999.550	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.974.000	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>110.448.720</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>62.208.940</b>	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	62.208.940	
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>43.239.880</b>	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	43.239.880	
<b>2.12.02.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>4.999.900</b>	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	4.999.900	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>166.159.740</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>63.459.840</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	63.459.840	
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>102.699.900</b>	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	102.699.900	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>82.884.780</b>	
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>82.884.780</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	32.484.820	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	50.399.960	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>66.297.136.038</b>	
<b>1.06.2.13.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>66.297.136.038</b>	
<b>1.06.2.13.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>66.297.136.038</b>	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.116.071.350</b>	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.441.487.100</b>	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.392.307.100	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.180.000	
<b>2.13.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.900.000	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.900.000	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>425.019.250</b>	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.750.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.000.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.269.250	
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>155.300.000</b>	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	63.900.000	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.400.000	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>864.365.000</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.615.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.110.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.640.000	
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>165.000.000</b>	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.13.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	65.000.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>2.13.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>15.000.000</b>	
2.13.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15.000.000	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>898.102.488</b>	
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>898.102.488</b>	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	20.000.000	
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	878.102.488	
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>25.000.000</b>	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>58.889.802.200</b>	
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>58.889.802.200</b>	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	70.000.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	57.682.452.200	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	100.000.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	40.000.000	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	827.850.000	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	50.000.000	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	20.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	34.500.000	
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>368.160.000</b>	
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>368.160.000</b>	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	268.160.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.000.000	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>6.768.379.486</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>6.768.379.486</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>6.768.379.486</b>	
<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.546.980.686</b>	
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.088.420.286</b>	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.926.720.286	
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	161.700.000	
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>219.857.400</b>	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.702.400	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.755.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.400.000	
<b>2.14.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>686.678.000</b>	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	686.678.000	
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>470.381.400</b>	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.687.400	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.694.000	
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.643.600</b>	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.643.600	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>75.352.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>55.357.000</b>	
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	35.381.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	9.987.600	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	9.988.400	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.995.000</b>	
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	10.000.000	
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	9.995.000	
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>2.069.790.250</b>	
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>243.000.000</b>	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	243.000.000	
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.433.620.000</b>	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	88.800.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	798.405.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	546.415.000	
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>134.420.250</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54.412.700	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	80.007.550	
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>258.750.000</b>	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	258.750.000	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>76.256.550</b>	
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>41.507.400</b>	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	41.507.400	
<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>34.749.150</b>	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.929.150	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.970.000	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	9.850.000	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>11.431.321.912</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>11.431.321.912</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>11.431.321.912</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.943.121.912</b>	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.043.825.312</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.043.825.312	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>276.800.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	176.800.000	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>750.500.000</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.000.000	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.460.000.000</b>	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.000.000	
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.683.818.000</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.218.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.505.600.000	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>728.178.600</b>	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	578.178.600	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>1.918.200.000</b>	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>360.000.000</b>	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	280.000.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	80.000.000	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>20.000.000</b>	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.058.200.000</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	978.200.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.000.000	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>390.000.000</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	130.000.000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	210.000.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000	
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.000.000</b>	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	70.000.000	
<b>2.15.02.2.11</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>570.000.000</b>	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.15.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>	
2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	
<b>2.15.03.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	
2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	
<b>2.15.03.2.13</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>480.000.000</b>	
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	480.000.000	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>5.677.294.890</b>	
<b>2.16.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>5.677.294.890</b>	
<b>2.16.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>5.677.294.890</b>	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.710.294.890</b>	
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>32.000.000</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.963.909.890</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.836.199.890	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.554.000	
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	95.156.000	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>322.290.000</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.290.000	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>367.095.000</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.095.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.000.000	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
-----------------	--	------------	--

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.16.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>5.000.000</b>	
2.16.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5.000.000	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.492.000.000</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.492.000.000</b>	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	55.000.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	37.000.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	95.000.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.000.000.000	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	250.000.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	15.000.000	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>475.000.000</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.000.000</b>	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30.000.000	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>420.000.000</b>	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	240.000.000	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	52.000.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	43.000.000	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	15.000.000	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>5.771.412.726</b>	
<b>3.30.2.17.3.31.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>5.771.412.726</b>	
<b>3.30.2.17.3.31.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>5.771.412.726</b>	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.483.897.026</b>	
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.777.290.856</b>	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.633.490.856	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.800.000	
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36.412.000</b>	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.412.000	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>370.426.070</b>	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.847.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.849.070	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.230.000	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.214.366.000</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.100.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.066.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.117.200.000	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.402.100</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.800.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.777.100	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.825.000	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>36.999.640</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>36.999.640</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.999.780	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.999.860	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>10.016.800</b>	
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.016.800</b>	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.016.800	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>49.999.800</b>	
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.999.800</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	49.999.800	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>67.999.880</b>	
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>67.999.880</b>	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.999.880	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>72.499.660</b>	
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>72.499.660</b>	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	14.999.880	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.499.800	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	19.999.980	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>49.999.920</b>	
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>49.999.920</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	49.999.920	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>5.920.324.774</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>5.920.324.774</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>5.920.324.774</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.787.972.774</b>	
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.611.080.874</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.611.080.874	
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>340.581.500</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.800.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.252.000	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.650.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.849.500	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.997.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.995.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.038.000	
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>110.580.500</b>	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.580.500	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>640.579.900</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.640.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.179.900	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.760.000	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.150.000</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>320.000.000</b>	
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>260.000.000</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	260.000.000	
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	60.000.000	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>310.000.000</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>310.000.000</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	150.000.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	80.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40.000.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40.000.000	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>452.352.000</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>452.352.000</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	122.618.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	276.220.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	53.514.000	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>4.371.652.413</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.19.3.26.2.22.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.371.652.413	
2.19.3.26.2.22.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.371.652.413	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.886.402.963</b>	
<b>2.19.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.361.645</b>	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.321.645	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.040.000	
<b>2.19.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.833.823.318</b>	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.216.527.386	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	617.295.932	
<b>2.19.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.997.730</b>	
2.19.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.997.730	
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.220.270</b>	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.000.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.220.270	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>423.348.500</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>423.348.500</b>	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	176.916.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	246.432.500	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>61.900.950</b>	
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.984.150</b>	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	20.984.150	
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.913.800</b>	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	10.910.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	10.003.800	
<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>20.003.000</b>	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	20.003.000	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>60.000.000</b>	
<b>2.16.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>60.000.000</b>	
<b>2.16.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>60.000.000</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>60.000.000</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.000.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10.000.000	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>2.16.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>2.16.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25.000.000	
-----------------	--	------------	--

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>186.856.950</b>	
<b>2.19.3.26.2.22.01.0000</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>186.856.950</b>	
<b>2.19.3.26.2.22.01.0000</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>186.856.950</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>58.242.250</b>	
<b>2.22.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.999.750</b>	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	9.999.750	
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48.242.500</b>	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	48.242.500	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>64.475.000</b>	
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>64.475.000</b>	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	64.475.000	
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>46.922.000</b>	
<b>2.22.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>46.922.000</b>	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	46.922.000	
<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>17.217.700</b>	
<b>2.22.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>17.217.700</b>	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	17.217.700	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>5.453.766.062</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>5.453.766.062</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>5.453.766.062</b>	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.230.887.482</b>	
<b>2.23.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.603.500</b>	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.600.800	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.002.700	
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.284.046.974</b>	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.046.974	
<b>2.23.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.264.060</b>	
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.264.060	
<b>2.23.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>48.766.000</b>	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.550.000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.216.000	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>210.416.726</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.420.206	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.339.600	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.401.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.982.920	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.079.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.194.000	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>436.406.222</b>	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.004.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.151.802	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.250.420	
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.218.384.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.312.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.149.072.000	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>222.878.580</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>148.272.500</b>	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	32.243.300	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.780.800	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	39.157.820	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	23.958.220	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.132.360	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>74.606.080</b>	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	42.062.800	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	32.543.280	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>81.985.880</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>81.985.880</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>81.985.880</b>	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>81.985.880</b>	
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23.299.960</b>	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23.299.960	
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.999.780</b>	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	8.999.780	
<b>2.24.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>49.686.140</b>	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	23.782.080	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25.904.060	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.071.300.000</b>	
<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.071.300.000</b>	
<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.071.300.000</b>	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>398.500.000</b>	
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>95.500.000</b>	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	30.500.000	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	65.000.000	
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>208.000.000</b>	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	168.000.000	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	25.000.000	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	15.000.000	
<b>3.25.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>85.000.000</b>	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	85.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
--------------	--	------------	--

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03.2.06.02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	10.000.000	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>509.800.000</b>	
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>245.000.000</b>	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.000.000	
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	50.000.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80.000.000	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>264.800.000</b>	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.000.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.800.000	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	54.000.000	
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	35.000.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>35.000.000</b>	
<b>3.25.05.2.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>35.000.000</b>	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.000.000	
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15.000.000	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>128.000.000</b>	
<b>3.25.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>15.000.000</b>	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>58.000.000</b>	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	58.000.000	
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>55.000.000</b>	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>226.125.000</b>	
<b>2.19.3.26.2.22.01.0000</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>226.125.000</b>	
<b>2.19.3.26.2.22.01.0000</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>226.125.000</b>	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>45.000.000</b>	
<b>3.26.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>45.000.000</b>	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	45.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	116.125.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	116.125.000	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	56.125.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	20.000.000	
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>3.26.04.2.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>10.000.000</b>	
3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	10.000.000	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>55.000.000</b>	
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>30.000.000</b>	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	30.000.000	
<b>3.26.05.2.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>25.000.000</b>	
3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	25.000.000	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>7.228.963.900</b>	
<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>7.228.963.900</b>	
<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>7.228.963.900</b>	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>5.232.818.900</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>3.516.255.000</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	62.600.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.453.655.000	
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>627.540.400</b>	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	290.830.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	112.310.400	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	224.400.000	
<b>3.27.02.2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>98.803.500</b>	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	98.803.500	
<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>624.720.000</b>	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	45.000.000	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	397.050.000	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	182.670.000	
<b>3.27.02.2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>365.500.000</b>	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	365.500.000	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>140.000.000</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>40.000.000</b>	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	40.000.000	
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>100.000.000</b>	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	100.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	277.000.000	
---------	--	-------------	--

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>227.000.000</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	227.000.000	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>50.000.000</b>	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50.000.000	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000	
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	30.000.000	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.499.145.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1.499.145.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.083.498.200	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	102.170.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	313.476.800	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>689.888.960</b>	
<b>3.30.2.17.3.31.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>689.888.960</b>	
<b>3.30.2.17.3.31.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>689.888.960</b>	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>33.000.000</b>	
<b>3.30.02.2.06</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>33.000.000</b>	
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	33.000.000	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>129.999.860</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>84.999.860</b>	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	84.999.860	
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>45.000.000</b>	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	45.000.000	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>406.000.000</b>	
<b>3.30.04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>381.000.000</b>	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	381.000.000	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25.000.000	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>120.889.100</b>	
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>120.889.100</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	98.889.160	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9.999.940	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	12.000.000	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>378.078.400</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.2.17.3.31.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	378.078.400	
3.30.2.17.3.31.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	378.078.400	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	135.030.500	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	135.030.500	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	14.077.500	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	120.953.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	243.047.900	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	243.047.900	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	243.047.900	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	150.000.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	150.000.000	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	25.000.000	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	125.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	25.813.538.774	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	25.813.538.774	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	25.813.538.774	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.184.210.774	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.432.484.014	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.432.484.014	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.940.620.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	255.020.000	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.685.600.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.743.196.716	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.145.730	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.439.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.012.584	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	421.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.600.000	
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	406.999.402	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.243.797.024	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	867.231.024	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.487.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.079.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.435.168.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	935.878.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.600.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.690.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.000.000	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>614.000.000</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	440.000.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	174.000.000	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>330.000.000</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	105.000.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	70.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	155.000.000	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.419.945.020</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	404.970.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	414.990.820	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	599.984.200	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>3.724.018.700</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>729.874.000</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	159.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	300.000.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	270.874.000	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>2.771.544.700</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	992.224.700	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	453.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.326.320.000	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>222.600.000</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	114.398.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	30.800.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	77.402.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>905.309.300</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>200.571.000</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	58.511.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.500.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	52.560.000	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>380.599.300</b>	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	140.000.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	101.117.900	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	139.481.400	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>258.214.000</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	61.079.400	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	34.998.800	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	162.135.800	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>65.925.000</b>	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	26.048.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	16.570.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	23.307.000	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>29.237.222.541</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>29.237.222.541</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>29.237.222.541</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.537.374.541</b>	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.550.032.977</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.485.152.977	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.880.000	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>94.840.000</b>	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.840.000	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>915.685.250</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.044.500	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.453.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	133.800.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.167.750	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	107.220.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>850.321.600</b>	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.321.600	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	742.000.000	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.308.805.800</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.045.800	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	808.760.000	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>839.920.000</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	559.920.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>10.636.303.914</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.268.453.914	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	280.250.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	87.600.000	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>3.341.465.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	367.435.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.974.030.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>8.699.848.000</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>1.118.943.000</b>	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	643.943.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	475.000.000	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.266.845.000</b>	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	556.000.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.710.845.000	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>2.669.510.000</b>	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.599.850.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.069.660.000	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>2.644.550.000</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.605.020.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	39.530.000	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>7.157.126.876</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>7.157.126.876</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>7.157.126.876</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.209.559.876</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60.089.000</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.389.000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.373.000	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.327.000	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.050.020.876</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.972.882.876	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.600.000	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.600.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.338.000	
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.600.000	
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	
<b>5.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>40.573.270</b>	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.573.270	
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>62.000.000</b>	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>513.862.080</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.534.080	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.328.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12.731.250</b>	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.731.250	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>367.283.400</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.150.400	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.133.000	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>103.000.000</b>	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>761.767.000</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>387.956.000</b>	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.000.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	52.600.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	40.600.000	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	128.156.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	151.600.000	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>162.800.000</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	55.000.000	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	69.000.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	38.800.000	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>211.011.000</b>	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	120.411.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90.600.000	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.185.800.000</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>338.990.000</b>	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.600.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.400.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	48.000.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	55.000.000	
-----------------	--	------------	--

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	126.990.000	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>386.910.000</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	113.380.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.250.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	47.000.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	106.000.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.030.000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.250.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.000.000	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	32.000.000	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>459.900.000</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.150.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.000.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	80.150.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	184.450.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	80.150.000	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	66.000.000	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>151.508.901.214</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>151.508.901.214</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>151.508.901.214</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>40.649.528.328</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>81.020.000</b>	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.990.000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.040.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.990.000	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>38.413.914.628</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.088.817.008	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.739.760	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	158.357.860	
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>184.328.550</b>	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	35.021.400	
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	149.307.150	
<b>5.02.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>66.813.500</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

5.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	66.813.500	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>99.999.150</b>	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	99.999.150	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>479.507.990</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.175.070	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.994.100	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.537.140	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.519.780	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.995.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.287.080	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.999.820	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>125.344.540</b>	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.106.040	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.238.500	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>797.193.550</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.463.840	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353.759.710	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.970.000	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.627.140</b>	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.034.800	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.592.340	
<b>5.02.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>293.779.280</b>	
5.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	159.999.780	
5.02.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	133.779.500	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>108.351.260.778</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.108.493.050</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	46.300.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	45.473.350	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43.178.400	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	45.291.250	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	45.481.200	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100.000.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.000.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	131.696.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	323.304.000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	93.721.350	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	84.047.500	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>649.287.400</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	61.896.600	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.000.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	108.399.850	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	54.999.700	
-----------------	--	------------	--

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	44.180.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	63.232.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	104.667.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	75.520.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	121.392.250	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>581.465.250</b>	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	49.999.800	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	117.999.560	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	101.306.100	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.999.740	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	150.749.760	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	61.016.740	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	40.393.550	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>106.012.015.078</b>	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.247.640.986	
5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	683.742.010	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	71.563.400.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	28.738.087.744	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.779.144.338	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>711.842.880</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>711.842.880</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	134.923.200	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	102.761.200	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	199.999.500	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	49.536.400	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	71.665.980	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	152.956.600	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.796.269.228</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>1.796.269.228</b>	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	81.522.736	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	851.375.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	106.903.206	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	50.050.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	133.232.606	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	314.372.170	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12.262.600	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	200.827.150	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	45.723.760	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>6.110.912.705</b>	
<b>5.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>6.110.912.705</b>	
<b>5.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>6.110.912.705</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.012.187.195</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>48.208.840</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.256.340	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.952.500	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.146.292.008</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.092.008	
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.200.000	
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.000.000</b>	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>41.719.700</b>	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.931.700	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.788.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>325.154.151</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.930.851	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.859.300	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.200.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.164.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>33.565.000</b>	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.565.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>285.099.996</b>	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.499.996	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.600.000	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>114.147.500</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.950.000	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.702.500	
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.495.000	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.098.725.510</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>458.775.000</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	62.800.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.475.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	168.000.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	14.500.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	430.000.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	15.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	65.000.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	350.000.000	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.016.994.150</b>	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50.000.000	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	767.294.400	
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	40.999.950	
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	59.999.800	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	28.700.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	40.000.000	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>192.956.360</b>	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	53.759.950	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	22.500.210	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	27.499.850	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	74.196.350	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15.000.000	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>43.000.000</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>43.000.000</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>43.000.000</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>43.000.000</b>	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>43.000.000</b>	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	43.000.000	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>7.600.975.736</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>7.600.975.736</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>7.600.975.736</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.961.775.736</b>	
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>70.000.000</b>	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.794.685.736</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.774.685.736	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	
<b>6.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>220.000.000</b>	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>361.290.000</b>	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.290.000	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>435.800.000</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.800.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.000.000</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.539.200.000</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.239.200.000</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	400.000.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	20.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	100.000.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	469.200.000	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	50.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100.000.000	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>300.000.000</b>	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	250.000.000	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>20.000.000</b>	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	20.000.000	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>80.000.000</b>	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30.000.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30.000.000	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>23.888.969.083</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN DUSUN HILIR</b>	<b>3.003.472.615</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN DUSUN HILIR</b>	<b>3.003.472.615</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.139.583.615</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.723.872.615</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.718.872.615	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>110.871.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.976.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.045.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>172.800.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.800.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.000.000</b>	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
<b>7.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>21.040.000</b>	
7.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.040.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>48.300.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>43.300.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>800.589.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>50.589.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.564.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.025.000	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>500.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000	
<b>7.01.03.2.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>250.000.000</b>	
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	250.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1.000.000</b>	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.000.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN DUSUN SELATAN</b>	<b>7.412.369.407</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN DUSUN SELATAN</b>	<b>7.412.369.407</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.404.618.573</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.733.744.838</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.733.744.838	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>188.049.500</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.300.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.969.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.780.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>470.159.735</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.759.735	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.664.500</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.600.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.064.500	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.007.750.834</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.061.050.834</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	403.510.014	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	647.540.820	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>196.700.000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	196.700.000	
<b>7.01.03.2.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>750.000.000</b>	
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	750.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN DUSUN UTARA</b>	<b>3.598.921.097</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN DUSUN UTARA</b>	<b>3.598.921.097</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.753.197.097</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.846.824</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.846.824	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.925.550.273</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.875.550.273	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>198.000.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	188.000.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>115.000.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>257.800.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.800.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>210.000.000</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>755.724.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>353.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>152.724.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	147.724.000	
<b>7.01.03.2.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>250.000.000</b>	
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	250.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>50.000.000</b>	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI</b>	<b>3.320.580.760</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI</b>	<b>3.320.580.760</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.197.389.280</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.000.000</b>	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.267.874.970</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.175.114.970	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.760.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>306.556.946</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.896	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.018.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.126.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.982.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.430.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>207.912.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.912.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>377.045.364</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.317.364	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.536.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.200.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>113.021.500</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>35.530.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.530.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>77.491.500</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.491.500	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>5.069.980</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>5.069.980</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.069.980	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.100.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.100.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.100.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN JENAMAS</b>	<b>3.156.453.951</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN JENAMAS</b>	<b>3.156.453.951</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.356.453.951</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.424.973.951</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.424.973.951	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>326.880.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.880.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>399.600.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.200.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.000.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100.000.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>690.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>415.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	220.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>25.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	
<b>7.01.03.2.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>250.000.000</b>	
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	250.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN KARAU KUALA</b>	<b>3.397.171.253</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN KARAU KUALA</b>	<b>3.397.171.253</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.598.446.253</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.874.043.413</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.874.043.413	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>226.525.160</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.911.160	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.214.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah</b>	<b>169.270.000</b>	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	9.600.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.980.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.690.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>273.407.680</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.407.680	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.200.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.200.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.220.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.980.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>40.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>40.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>727.975.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>350.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	224.150.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125.850.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>127.975.000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	127.975.000	
<b>7.01.03.2.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>250.000.000</b>	
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	250.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>30.750.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>30.750.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.750.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>4.933.493.518</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>4.933.493.518</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>4.933.493.518</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.889.148.128</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.250.000</b>	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.250.000	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.254.245.518</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.245.518	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>264.393.410</b>	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.877.100	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.527.750	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.707.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.891.500	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.390.060	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>354.259.200</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.059.200	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.200.000	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>123.814.250</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>123.814.250</b>	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13.000.000	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	23.310.000	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	21.508.250	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	29.856.000	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	36.140.000	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>1.842.347.000</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1.842.347.000</b>	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.250.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.787.850.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.627.000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.620.000	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>18.949.800</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>18.949.800</b>	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.250.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.699.800	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>59.234.340</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>59.234.340</b>	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.549.780	

**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.234.600	
-----------------	---	------------	--



**Rekapitulasi Belanja Per Urusan/Unsur  
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.449.960	

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

#### **6.1 Penerimaan Pembiayaan.**

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pada Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya diperkirakan sebesar Rp80.000.000.000,00.

#### **6.2 Pengeluaran Pembiayaan.**

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp62.300.000.000,00, yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp12.300.000.000,00.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp50.000.000.000,00.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp80.000.000.000,00, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp62.300.000.000,00, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.700.000.000,00.

#### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**

Anggaran yang direncanakan pada Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp17.700.000.000,00, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp17.700.000.000,00, maka dengan demikian pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan**  
**Tahun Anggaran 2022**

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 Strategi Pencapaian Target Penerimaan Daerah.**

##### 7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah:

1. Pendataan dan mendaftarkan objek Pajak dan wajib pajak yang baru.
2. Memaksimalkan penggalian potensi Pajak Daerah yang sudah ada. seperti pemutakhiran data wajib Pajak dan wajib Retribusi, menaikkan batas minimal SPPT PBB, memperbaharui PERDA dan PERBUP yang sudah kadaluarsa.
3. Melaksanakan pekan panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya untuk menarik minat wajib Pajak dan wajib Retribusi dalam hal membayar Pajak dan Retribusi dan bagi wajib Pajak yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari pemerintah daerah sebagai wujud terima kasih pemerintah daerah kepada wajib Pajak dan wajib Retribusi yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
4. Memaksimalkan penagihan Pajak dan Retribusi dengan cara bekerjasama dengan pihak terkait dan membentuk tim terpadu.
5. Secara berkala memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target pendapatan, dengan cara review atas pencapaian Pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara periodik (1 bulan sekali).
6. Bekerjasama dengan pihak BAPPEDA Kab. Barito Selatan dan pihak terkait untuk melakukan pengkajian dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah.
7. Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) pemungutan dan penagihan Pajak-Retribusi.
8. Sosialisasi Pajak-Retribusi (pemasangan spanduk, banner, baliho, siaran radio, dan talkshow radio).
9. Peningkatan kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia bidang Pajak- Retribusi, seperti Pelatihan pemetaan dan penilaian obyek PBB-P2.
10. Pemungutan Pajak terpadu online (e-Pajak).
11. Tanda tangan digital Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.
12. Pemungutan Retribusi terpadu online (e-Retribusi).

13. Pemberian insentif 5% atas pencapaian target Pajak-Retribusi pada pengelola/petugas PAD.
14. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan online (tanda tangan digital, aplikasi perizinan, dan siap antar perizinan-non-perizinan).
15. Penagihan piutang Pajak-Retribusi.
16. Peningkatan kepatuhan wajib Pajak dan Retribusi: a) Operasi pro justisia perizinan (Pajak reklame, PJU, izin trayek, KIR Kendaraan, IMB, dan lain-lain); b) Pekan panutan wajib Pajak c) Penghargaan pada wajib Pajak d) Pemberian sanksi pada wajib Pajak dan Retribusi yang belum/tidak membayar termasuk petugas pungut yang belum menyetorkan Pajak .

#### 7.1.2 Strategi pencapaian target penerimaan pembiayaan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, unsur penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Adapun strategi pencapaian target penerimaan pembiayaan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi target penerimaan pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dianggarkan dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

## 7.2 Strategi Penyerapan APBD.

Strategi dalam rangka optimalisasi penyerapan APBD antara lain:

1. Melakukan rapat rutin, setiap bulan untuk mengetahui pencapaian target realisasi APBD.
2. Mengoptimalkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (TEPRA), terutama dalam rangka tugas:
  - a. Melakukan pendataan rencana penyerapan anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. Menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program;
  - c. Menginventarisir jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan langsung, penunjukkan langsung dan/atau swakelola.
  - d. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program.
  - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah.
3. Menjadikan pencapaian target realisasi APBD sebagai salah satu instrument untuk memberikan *reward* dan *punishmen* terhadap kinerja Kepala Perangkat Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya merupakan aktualisasi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022. Substansi pokok yang dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 ini, selanjutnya akan dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan didanai dari APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022. Oleh sebab itu, untuk menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan serta membutuhkan disiplin perilaku yang amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan dapat diwujudkan.

Mengingat KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan komitmen seluruh *stakeholder*, maka dokumen KUA dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyusunan rancangan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022. Selain itu Kebijakan Umum APBD akan menjadi acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di kabupaten Barito Selatan maka Bupati Barito Selatan akan melaksanakan Pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan pada semua Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan

kemajuan fisik dan keuangan secara berkala kepada Bupati Barito Selatan cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD pada tahun berikutnya.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini disusun dan selanjutnya disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Buntok, 24 November 2021.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BARITO SELATAN**

Selaku,  
PIHAK KEDUA

**Ir. H. M. FARID YUSRAN, M.M**  
KETUA

**Hj. ENUNG IRAWATI**  
WAKIL KETUA II

**BUPATI BARITO SELATAN**

Selaku,  
PIHAK PERTAMA

**EDDY RAYA SAMSURI**